

MELAWAN PENGANGGURAN: PEMIKIRAN EKONOMI AL-SHAYBANI

Oleh:

Muhammad Hikam

Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Email: greendomesgmail.com

Abstract: This paper seeks to show that government policies that restrict intervention or no intervention at all in the unemployment rate become a-historical view and even irrational. The Postulat is in historical data that occurs at the time of al-Amin and al-Ma'mun and "initiation al-Shaybani" -if not be called "theory of al-Shaybani". In line with the context of the economic crisis at the time of al-Amin, the initiation of al-Shaybani which is implemented by al-Ma'mun may be referred to unemployment "stabilization policy". The idea of al-Shaybani on social security established the coherence with contractual policy which is substantively has six features: (1) share work and early retirement. (2) A policy in favor of the cost of labor turnover. (3) Profit sharing. (4) Low wages subsidy and a reduction in payroll taxes. (5) Subsidy of recruitment of new workers. (6) The transfer of profits. This contractual policy is voiced by Lindbeck and Snower (1988), M. Weitzman (1984).

Abstrak: Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang membatasi intervensi atau sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap tingkat pengangguran menjadi pandangan yang ahistoris bahkan irasional. Postulatnya adalah data sejarah yang terjadi pada masa al-Amin dan al-Ma'mun dan "inisiasi al-Shaybani"—kalau belum dapat disebut "teori al-Shaybani". Dengan konteks krisis ekonomi pada masa al-Amin, inisiasi al-Shaybani yang diimplementasikan al-Ma'mun itu boleh disebut sebagai "kebijakan stabilisasi" pengangguran. Gagasan al-Shaybani tentang jaminan sosial membentuk koherensi dengan kebijakan kontraktual yang secara substantif memiliki enam fitur: (1) berbagi kerja dan pensiun dini. (2) kebijakan berpihak pada biaya perputaran tenaga kerja. (3) profit sharing atau bagi keuntungan. (4) subsidi upah rendah dan pengurangan pajak penggajian. (5) Subsidi rekrutmen pekerja baru. (6) transfer keuntungan. Kebijakan kontraktual ini di antaranya disuarakan oleh Lindbeck & Snower (1988), M. Weitzman (1984).

Pendahuluan

Keputusan dan arah kebijakan pemerintah memiliki peran yang penting dalam menekan tingkat pengangguran. Dalam diskursus kebijakan pengangguran, tipologi kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan teori ekonomi yang dijadikan landasan (*underlying theories*).¹ Hubungan tripartit

antara pemerintah, pengusaha/ perusahaan, dan pekerja dalam hal ini menjadi kerangka yang kemudian sulit untuk dilepaskan. Mereka inilah tiga aktor dalam episode terkait pasar pekerja²

Maka dalam sejarah ditemukan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu terkait kasus-kasus ekonomi. Data-data terkait sejarah pemerintahan Abbasiyah, misalnya menyebut adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh tidak sehatnya manajemen ekonomi pemerintahan al-Amin. Kasus ini menarik untuk dilihat karena pada pemerintahan al-Ma'mun, krisis ini dapat diatasi.³

¹ Lihat misalnya: Stefano Scarpetta, "Assesing the Role of Labour Market Policies and Institutional Settings on Unemployment: A Cross-Country Studies," *OECD Economic Studies*, no. 26 (1996): 1-56; Dennis J. Snower & Guillermo de la Daheza, ed., *Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Gary Burtless, "Can Supply-Side Policies Reduce Unemployment?: Lesson from North America," *Center for Economic Policy Research Discussion Paper, ANU*. No. 440 (November, 2001); T. Boeri, R. Layard, and S. Nickell, "Welfare-to Work and the Fight Against Long Term Unemployment," *Report to Prime Minister Blair & D'Alema* (2000): 1-36; Jochen

Kluve, et. al., *Active Labour Market in Europe: Performance and Perspective* (Berlin: Springer, 2007).

² George J. Borjas, *Labor Economics*, 3th Edition (New York: McGraw-Hill Irwin, 2005), 3.

³ Salah satu indikator pengentasan krisis ekonomi yang dicapai oleh al-Ma'mun yaitu kas negara yang mencapai

Yang menjadi pertanyaan adalah: teori apa dan siapa yang menjadi landasan kebijakan al-Ma'mūn untuk mengatasi krisis.

Oleh karena itu, studi ekonomi yang menggali khazanah pemikiran ekonomi yang bernuansa ke-Islaman nampaknya perlu terus dilakukan. Pendekatan sejarah secara umum tentu saja lumrah dilakukan. Namun akan sangat relevan bila teks-teks sejarah dan pemikiran yang tentu memiliki realitas kompleks ini didekati melalui kajian yang inter-disipliner. Maka sembari merespon tawaran Shamim A. Siddiqi,⁴ penelitian ini akan mendekati al-Shaybani sebagai salah seorang pemikir ekonomi⁵-hukum Islam setidaknya dengan dua pendekatan utama: ekonomi-politik dan historiografi ekonomi.

Menurut M. Bonner, Khilafah Abbasiyah pada masa al-Shaybani mengalami *economic sphere*.⁶ Sejarawan al-Ya'qūbī menggambarkan

angka 390.855.000 Dirham atau setara dengan sekitar 25.014.720.000.000 Rupiah setelah sebelumnya “habis” karena manajemen buruk pemerintahan al-Amīn (Lihat misalnya keterangan Ahmad ibn 'Abd Allāh al-Qalaqshandī, *Ma'āthir al-Ināqab fī Ma'ālim al-Khilāfah*, vol. 1 [Kuwait: Matb'ah Dār al-Hukūmah, 1985], 93; Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, vol. 3 [Cairo:], 142; Ibn Khaldūn, *Tārīkh ibn Khaldūn* vol. 1 (Beirut: al-'Ālām al-'Arabī, t.t.), 151; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā'* [Beirut: Dār al-Fikr, t.t.], 276-284).

⁴ Shamim Ahmad Siddiqi, “a Suggested Methodology for the Political Economy of Islam” *King Abdul Aziz University Journal: Islamic Economics*, no. 22 (2009) : 101-142. Secara defenitif, Shamim tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksudkan dengan pendekatan pluralistik. Namun, nampaknya penekanan yang dibuatnya terletak pada ‘tidak menolak mentah-mentah apa yang ditawarkan oleh ekonomi barat.’

⁵ Tanpa argumentasi, M. Bonner dalam “the Kitāb al-Kasb Attributed to al-Shaybānī: poverty, surplus, and the circulation of wealth” dalam *the Journal of the American Oriental Society*, no. 3, vol. 121, (2001) : 410, mengklaim ilmu ekonomi dalam tradisi Islam-Arab diistilahkan dengan “*Ilm Tadbir al-Manzil*,” padahal penyebutan ini terbatas dalam konteks pekerjaan perempuan dalam mengurus rumah tangga (Lihat misalnya: Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, vol. 1 [t.t.p], 388; 'Alī ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* [Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987]).

⁶ Lihat: keterangan M Bonner, “the Kitāb al-Kasb Attributed to al-Shaybānī: poverty, surplus, and the circulation of wealth” dalam *the Journal of the American Oriental Society* 121 no. 3 (2001) : 412; United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and

kondisi di mana saat itu masyarakat mendapatkan kesejahteraan melalui pengembangan dan ekspansi ekonomi. Namun ini disinyalir, seperti dicatat oleh S. D. Goitein membawa pada tumbuhnya borjuasi arab pertama dalam sejarah Islam.⁷

Meski ada perdebatan tentang catatan Goitein, yang menarik dari setting sejarah seperti itu, bahwa al-Shaybānī malah mendiktekan al-Kasb yang notabene berisi pesan mengenai produktivitas dan kinerja. Secara implisit, ini dapat dibaca dengan dua pandangan: (1) respon al-Shaybānī terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi; dan (2) pandangan futuristik al-Shaybānī terhadap gejala-gejala sosial yang akan terjadi di masa akan datang.

Namun bila melihat sedikit informasi yang dapat digali dari beberapa literatur, al-Kasb malah dibuat karena permintaan teman-teman al-Shaybānī yang memerlukan nasehat “gaya hidup” darinya. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikatakan sendiri oleh al-Shaybānī dalam pembukaan al-Kasb sebagaimana keterangan al-Sarakhsī (w. 1175 M./571 H.).⁸ Namun tentu saja, masih terdapat ruang interpretasi lain yang dapat melengkapi pengakuan tersebut yaitu informasi lain yang sifatnya lebih umum dan terjadi pada saat itu. Pencarian latar belakang ini sangat relevan bila dikaitkan dengan isi pandangan al-Shaybānī dalam al-Kasb yang sangat erat terkait empat hal⁹: (1) produktivitas dan pembagian kerja; (2) distribusi kekayaan; (3) kemiskinan; dan (4) konsumsi.

Maka terjadilah apa yang disebut belakangan sebagai kelas ekonomi pada struktur masyarakat

Development, World Bank, 2005, *Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, Studies in Methods*, Series F, No. 61, Rev. 1, Glossary, United Nations, New York, paragraf. 3, 79.

⁷ S. D. Goitein, “the Rise of the Middle-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times,” *Cahiers d'histoire mondiale*, III (1957); Edisi revisi dalam *Studies in Islam and Islamic Institutions* (1966): 217.

⁸ Muhammad ibn Muhammad Radī al-Dīn Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, vol. 12 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1331), 11.

⁹ Muhammad ibn al-Hasan Al-Shaybānī, *al-Kasb* (Manuskrip Mūsā Kāzīm, no. 1153, Jami'at Umm al-Qurā, Maktabat al-Malik 'Abd Allāh bin 'Abd al-'Azīz), 63-65.

¹⁰ J. Steven Lendefeld, Eugene P. Seskin, dan Barbara M. Fraumeni, “Taking the Pulse of the Economy: Measuring GDP,” *Journal of Economic Perspectives* 22, no. 2 (Spring 2008) : 193-216; lihat: <http://unstats.un.org/unsd/sna1993/toclev8.asp?L1=1&L2=2>. Diakses 20 Oktober 2010.

saat itu. Philip K. Hitti¹⁰ menulis bahwa kelas atas masyarakat saat itu dihuni oleh para aristokrat, selanjutnya kelas tingkat dua terdiri atas para penulis sastra, orang terpelajar, seniman, pengusaha, pengrajin, dan pekerja profesional. Sementara kelas bawah yang merupakan masyarakat mayoritas terdiri atas petani, pengembala, dan penduduk sipil yang menjadi penduduk asli dan berstatus sebagai *dhimmi*. Celakanya, kelas-kelas ini nampaknya membentuk polarisasi pada rentang antara pertengahan abad ketiga dan pertengahan abad keempat. Kelas penguasa dengan membebankan pajak yang tinggi dan regulasi yang tidak mendukung pada bidang pertanian dan industri rumah tangga. Para penguasa semakin kaya, rakyat justru makin miskin.¹¹

Pengangguran Abad Pertengahan

Dengan asumsi angkatan kerja sekitar 40 juta orang, jumlah pengangguran pada jaman al-Rashīd, dengan data sumber terbatas,¹² dapat diperkirakan mencapai paling tidak 150 ribu orang atau sekitar 0,37 persen.

Sementara pada fase pemerintahan al-Amīn, dari data yang “sangat terbatas”, diperkirakan jumlah pengangguran mencapai hingga 927 ribu orang atau 92,7% dari keseluruhan populasi Baghdad atau 2,43 persen dari asumsi 40 juta orang angkatan kerja penduduk negara Abbasiyah.

Estimasi angka 927 ribu ini didapat dari pengurangan populasi Baghdad yang mencapai 1 juta orang¹³ dengan jumlah pegawai dan keluarga

kerajaan (sekitar 33 ribu orang)¹⁴ dan prajurit (40 ribu orang)¹⁵ sehingga jumlah orang yang bekerja tetap dan menjabat “*abdi dalem*” di lingkungan pemerintah sekitar 73 ribu orang. Sementara digambarkan oleh sebagian sejarawan bahwa saat krisis politik dan perang terjadi antara al-Amīn dan al-Ma’mūn, terutama saat Baghdad diembargo oleh pasukan al-Ma’mūn, kondisi mayoritas masyarakat Baghdad sangat buruk.¹⁶ Ini boleh berarti bahwa kelaparan ini lebih dikarenakan situasi Baghdad yang tidak menentu, sehingga pengusaha dan pemerintah tidak berani melakukan *spending*. Bahkan dalam keadaan seperti ini, pemerintah al-Amīn di Baghdad masih memungut “potongan/*ya’shuru*” kekayaan para pedagang Baghdad¹⁷. Dengan kata lain, realitas ini menunjukkan bahwa kurva agregat demand semakin bergeser ke dalam (*inward*), hingga kemudian menyebabkan resesi dan pengangguran tingkat tinggi. Namun menariknya, ini juga diiringi oleh stagflasi yaitu inflasi yang terjadi saat perekonomian berjalan stagnan atau mengalami resesi¹⁸ karena efek embargo ekonomi yang luar biasa.¹⁹

Pada masa pemerintahan al-Ma’mūn, diperkirakan setidaknya jumlah pengangguran mencapai 170 ribu orang yang terdiri atas 150 ribu orang pengangguran friksional (*al-‘ayyārūn dan al-ṣinjīyūn*), 20 ribu penganggur struktural (*al-sa’alike*). Sehingga jumlah pengangguran adalah 170 ribu orang atau sekitar 0,42 persen. Hasil persentase ini adalah hasil kalkulasi dari rumus umum yang digunakan untuk mengukur angka pengangguran yaitu:

$$\frac{Nu}{Lf} \times$$

¹⁰ Philip K. Hitti, *History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present*, 7th Edition (New York: Palgrave Macmillan, 1974), 341.

¹¹ Lihat misalnya keterangan Philip K. Hitti, *History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present* (New York: Palgrave Macmillan, 1974), 618.

¹² George Zaydān, *Tārikh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 5, cet. 3 (Cairo: Dār al-Hilāl, 1921), 52) Nominal 170 ribu sebagai jumlah asumsi ini berdasarkan kalkulasi penulis pada jumlah ‘*ayyārūn* (penganggur; pemalas) yang tercatat pada jaman al-Ma’mūn yaitu 50 ribu orang (al-Mas’ūdī, *Murūj al-Dhahab wa Ma’ādīn al-Jamhar*, vol. 2, 218). Ibn al-Athīr mencatat bahwa jumlah fakir miskin (*sha’alike*) yang dimiliki salah satu elit pada masa pemerintahan Harūn al-Rashīd dan al-Ma’mūn bernama Abī Dīl al-‘Ajlī [w. 226 H./840 M.] mencapai 20 ribu orang (Ibn al-Athīr, *Uṣd al-Ghābah*, vol. 7, 69; al-Ziriklī, *al-A’alām*, vol. 5, 719). Sementara jumlah pekerja ekspatriat dari orang berkulit hitam (*al-ṣinjī*), yang rentan mengalami pemutusan kerja dan minim hak, mencapai ratusan ribu orang (George Zaydān, *Tārikh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 5, 55).

¹³ George Zaydan, *Tārikh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 2, 119.

¹⁴ Keluarga kerajaan (*anlād al-‘Abbās*) ini disensus pada pemerintahan al-Ma’mūn, tepatnya tahun 200 H./815 M. atau dua tahun setelah terbunuhnya Khalifah al-Amīn. (Lihat: al-Tabarī, *Tārikh al-Rusul wa al-Mulūk*, vol. 5, 139; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tārikh al-Khulafā’*, vol. 1, 137).

¹⁵ 40 ribu orang pasukan adalah jumlah mereka yang dikirim oleh al-Amīn untuk menyerang al-Ma’mūn pada tahun 195 H./810. (Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tārikh al-Khulafā’*, vol. 1, 122).

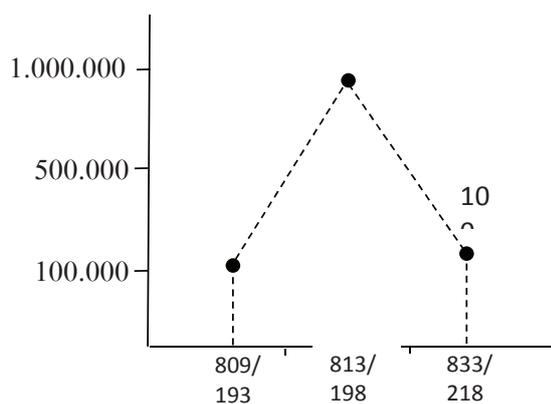
¹⁶ Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, vol. 3, 136; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tārikh al-Khulafā’*, vol. 1, 122.

¹⁷ Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, vol. 3, 134; al-Dhahabī, *Tārikh al-Islām*, vol. 3, 440.

¹⁸ William J. Baumol & Alan S. Blinder, *Economics: Principles and Policy*, 12th Edition, 479.

¹⁹ Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, vol. 3, 135.

Dimana N_u adalah jumlah pengangguran. Sementara L_f adalah jumlah angkatan kerja yang mencakup jumlah keseluruhan pekerja baik yang sedang bekerja ataupun tidak.²⁰ Maka dengan kata lain, pada masa al-Ma'mūn jumlah pekerja secara umum mencapai 39.830.000 orang. Nominal ini setidaknya menunjukkan bahwa rasio pekerja jauh lebih banyak dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.



Gambar 2. Ilustrasi pergerakan angka estimasi pengangguran pada masa al-Rashīd (w. 809 M./193 H.), al-Amīn (w. 813 M./198 H.), dan al-Ma'mūn (w. 833 M./218 H.)

Namun, kesulitannya adalah menentukan apakah jumlah ini adalah persis (*precisely*) faktual. Bilapun dianggap faktual, maka tingkat pengangguran pada pemerintahan al-Ma'mūn relatif sedikit. Namun demikian—meminjam istilah S. Pamuk dan Maya Shatzmiller—dalam terma komparatif, kualitas dan kuantitas data dalam studi ini lebih banyak (*greater*), detail (*more detailed*), dan berlimpah (*abundant*) ketimbang data yang digunakan untuk studi masyarakat abad pertengahan lain.²¹

²⁰ Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, (New York: Prentice-Hall, Inc., 2001), 582; George J. Borjas, *Labor Economics*, 3th Edition (New York: McGraw-Hill Irwin, 2005), 23.

²¹ Komparasi dapat dilakukan pada studi lain yang menggunakan data-data terbatas seperti terkait Dinasti Byzantium oleh Morrison & Cheynet (2002), Laiou dan Morison (2007), dan Millanovich (2006). Demikian pula dengan studi terkait Dinasti Romawi yang dihasilkan oleh Goldsmith (1984), Scheidel & Friesen (2009), Lo Cascio & Malanmia (Şevket Pamuk and Maya Shatzmiller, "Real Wages and GDP per Capita in Medieval Islamic Middle East in Comparative Perspective, 700-1500," *Paper presented at the 9th Conference of the European Historical Economics Society* (September 2011): 5.

Lalu pertanyaan turunannya adalah bagaimana memetakan para penganggur tersebut dalam konteks kekinian?

"Al-Iktisab" sebagai Proposal

Kerangka kerja Richard Layard di atas nampaknya relevan bila difungsikan pada gagasan al-Shaybānī terkait permasalahan pengangguran. Al-Shaybānī menawarkan empat satuan kerangka strategi untuk "menekan" pengangguran yaitu : (1) pendekatan persepsi; (2) urgensi "pelatihan" dan spesialisasi; (3) kebijakan income dan jaminan sosial; (4) pola hidup "secukupnya/*keifāyah*". Apa yang ditawarkan oleh al-Shaybānī ini bila dibaca dengan kerangka kerja (*framework*) Richard Layard, dapat dinilai sebagai strategi penyeimbang dua sisi: *supply* dan *demand* dalam pasar pekerja. Letak distingsi yang membedakan antara kedua gagasan terletak pada gagasan terkait pendekatan persepsi yang digunakan oleh al-Shaybānī. Nampaknya, bagi al-Shaybānī pandangan atau daya memahami (persepsi) seseorang terhadap sesuatu dapat mempengaruhi mekanisme supply dan demand dalam pasar pekerja.

Tawaran al-Shaybānī dalam *al-Iktisāb* sendiri memiliki korelasi dengan kebijakan pemerintahan al-Ma'mūn karena dalam beberapa dasawarsa sebelumnya, jabatan Qadi (Jaksa Agung) bidang hukum dipegang oleh ahli hukum dari aliran Hanafiyah, atau pengikut metodologi Abū Hanīfah. Meski al-Shaybānī sudah keburu meninggal, saat menjabat al-Ma'mūn mengangkat penukil al-Iktisāb yaitu Muḥammad ibn Sammā'ah—yang notabene salah seorang murid senior Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī—sebagai Hakim Agung (*al-Qādi*). Bahkan setelah Ibn Sammā'ah mengundurkan diri, al-Ma'mūn masih mengangkat ahli hukum bermazhab Hanafiyah yaitu Ismā'īl ibn Hammād ibn Abī Hanīfah untuk mengisi posisi tersebut.²² Di beberapa daerah hal senada juga terjadi, misalnya putera Abū Hanīfah²³ sebagai Tuan Kadi (*al-Qādi*) di kota Kufah dan 'Abd Allāh ibn Suwār di kota Basrah. Ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa mazhab negara lebih didominasi oleh aliran

²² Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, vol. 5, 164.

²³ Lihat misalnya keterangan sejarawan Khalīfah ibn Khayyāt al-Laythī terkait nama-nama pejabat Hakim Agung (Qudāt) (Khalīfah ibn Khayyāt al-Laythī, *Tarikh Khalīfah ibn Khayyāt*, vol.1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1397 H.), 140.

agamis-rasional. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber primer mazhab ini, seperti yang ditulis al-Shaybānī, mendapat tempat khusus dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.

Dalam kapasitas sebagai cendikia filsafat-pemerintahan, Ibn Khaldūn secara lebih khusus menyebut bahwa jabatan *qadi* memiliki posisi yang cukup signifikan dalam pemerintahan. Jabatan *Qādi* pada dasarnya mengurus perkara-perkara pengadilan yang sebenarnya bersifat menyerap (*absorptive*) terhadap dua poros, baik kekuasaan ataupun magistrasi. Pada masa al-Ma'mūn misalnya, seorang *Qādi* bahkan dapat memimpin bala tentara yang dikirim ke wilayah Romawi.²⁴ Hal ini berarti bahwa posisi *Qādi* sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah (*khalifah*) yang sangat sentralistik dan terlampaui besar.

Meski penulis belum mendapat informasi primer yang bersifat langsung dari sumber pertama seperti al-Ma'mūn atau Ibn Sammā'ah terkait hubungan kebijakan pemerintah dan konten gagasan dalam al-Iktisāb, namun beberapa informasi tentang pemerintahan al-Ma'mūn dapat menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara gagasan al-Shaybānī dan kebijakan al-Ma'mūn dalam mengatasi krisis ekonomi, terutama pengangguran. Secara metodologis, ini setidaknya dapat dilihat dari *fahwā khitāb al-tārikh* (sejarah substantif) yang bersumber dari data-data sejarah yang akan diuraikan pada bagian nanti.

Secara khusus, terdapat diktum al-Ma'mūn terkait orang-orang pengangguran yang sejatinya bekerja atau bila tidak menjadi beban atas pemerintah. Ini berarti ada ongkos sosial yang harus dibayar oleh masyarakat sehingga menjadi tugas pemerintah untuk “menekan atau mengelola” jumlah penganggur. Diktum al-Ma'mūn itu sebagai berikut:

الناس على أربعة أقسام : زراعة وصناعة وتجارة وإمارة
فمن خرج عن هذه الأشياء فهو كل علينا²⁵

“Pekerjaan masyarakat kita ada empat varian: pertanian, industri, perdagangan, dan pemerintahan. Barang siapa yang tidak bekerja dalam bagian-bagian ini, maka orang itu adalah beban atas kami”.

²⁴ Ibn Khaldūn, *Tārikh ibn Khaldūn*, vol. 1, 116.

²⁵ Muhammad ibn Ahmad ibn Uthmān al-Dhahabī, *Tārikh al-Islām*, ed. ‘Umar ‘Abd al-Salām Tadmūrī, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), 1903.

a Pendekatan Persepsi

Gagasan pertama al-Shaybānī dalam melakukan reformasi pasar pekerja adalah melalui pendekatan persepsi baik dari pihak pekerja, pedagang ataupun dari para pemegang kebijakan. Uniknya, pembentukan persepsi yang dimaksud menyentuh paradigma berpikir yang bercorak rasional-agamis. Disebut demikian karena al-Shaybānī menawarkan pendekatan-pendekatan normatif yang kental dengan argumentasi al-Qur’an maupun al-Sunnah, namun tidak meninggalkan penggunaan analisis rasional terhadap realitas baik sebagai ilustrasi-instrumen sekunder atau argumentasi empirik-primer. Inilah yang nampaknya menjadi titik distingtif pada konstruk berfikir al-Shaybānī yang agak membedakannya dengan sementara pemikir Islam lainnya. Sebagai contoh, hasil formulasi al-Shaybānī terkait hukum mencari rezeki atau berusaha (*al-kasb*). Sebagian pemikir hukum Islam yang lain mengatakan bahwa berusaha itu hukumnya boleh-boleh saja (*mubāh*),²⁶ atau paling tidak, hukumnya dianjurkan (*mandūb*).²⁷ Al-Shaybānī malah menyimpulkan bahwa berusaha mencari rezeki untuk keperluan mendasar (*mā lā budda minhu*) hukumnya adalah wajib (*farīdab*).²⁸ Perbedaan beberapa cara pandang terhadap “aktivitas bekerja mencari rezeki” ini kiranya berakar dari identifikasi terhadap defenisi “al-kasb” dan terhadap dalil hukum yang tersedia. Di samping itu, asumsi-asumsi terhadap perkembangan realitas yang berkembang terkait obyek hukum juga dapat mempengaruhi perbedaan formulasi persepsi hukum.²⁹ Di lain kesempatan, al-Shaybānī menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai keperluan mendasar ini. Yaitu, *mā yuqīmu bibi sulbahu* (makanan pokok untuk hidup sehari-hari),

²⁶ Abū Muhammad al-Husayn ibn Mahmūd al-Baghawī, *Ma’ālim al-Tanzīl*, vol. 1, ed. Muhammad ‘Abd Allāh al-Namir, dkk. (Madinah: Dār Taybah li al-Nashr wa al-Tawzī‘i, 1997), 329.

²⁷ Muhammad ibn Ismā‘īl al-Shan‘ānī, *Subul al-Salām Sharh Bulūgh al-Marām*, ed. Ibrāhīm ‘Ashr, vol. 4, cet. 7 (Cairo: Dār al-Hadīth, 1992), 1558.

²⁸ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Rizq al-Mustatāb*, 27; Wahbah al-Zuhaylī menulis bahwa berusaha itu merupakan kewajiban (*farīdab*) bagi orang yang mampu (Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adīllatuhū*, vol. 7, cet. 2 (Damaskus, Dār al-Fikr, 1985), 16.

²⁹ Lihat pendekatan yang digunakan oleh al-Ghazālī dalam *Ihyā* terkait pelbagai dinamika pada obyek hukum (*al-mukallaf*) dalam topik mencari rezeki (*al-kasb*) (al-Ghazālī, *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*, vol. 2, 64).

dan *mā yatawassalu ilā iqāmat al-fara'id* (hal lain yang menunjang pelaksanaan kewajiban).³⁰ Penjelasan yang belum gamblang ini kemudian dirinci kembali oleh al-Shaybāni dengan menyebut empat keperluan mendasar yang bersifat materil, yaitu (1) pangan [*al-ta'ām*]; (2) air [*al-sharāb*]; (3) sandang; [*al-libās*] dan (4) tempat tinggal [*al-kinn*].³¹

Al-Shaybāni yang meninggal di Rhages³² telah berbicara tentang produksi yang ia titik beratkan pada pekerjaan produktif (*al-kaṣb*). Sebagaimana nanti disampaikan, ia membagi pekerjaan ini menjadi empat varian: sewa-menyewa; perdagangan; pertanian, dan industri.³³ Selain itu, al-Shaybāni juga membahas aktivitas distributif (*al-tawzi'*), yang difokuskan pada aktivitas derma.³⁴ Kemudian, yang terakhir, ia mengangkat diskursus konsumtif (*al-istiblāk*) yang dia sebut harus seimbang dan sesuai dengan norma agama.³⁵ Dalam konteks perubahan persepsi, dapat dikatakan bahwa al-Shaybāni menyentuh hulu dan hilir aktivitas perekonomian.

Dalam konteks kajian kekinian, gagasan al-Shaybāni ini relevan bila dibaca dalam kerangka psikologi kerja dan perusahaan. Liat Kulik, misalnya, melakukan survey kepada 594 responden warga Israel terkait intensitas pencarian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hasilnya, peran pendidikan, latar belakang, dan implikasi kerja sangat mempengaruhi psikologi seseorang dalam melihat suatu pekerjaan.³⁶

b. Doktrin Keagamaan dan Pengangguran

Meski demikian, nampaknya masih relatif sedikit studi-studi mendalam terkait pengangguran dalam kerangka ekonomi yang menganalisis terkait hubungan antara doktrin agama dan pengaruhnya

³⁰ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybāni, *al-Iktisāb fī al-Riḥg al-Mustatāb*, 35.

³¹ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybāni, *al-Iktisāb fī al-Riḥg al-Mustatāb*, 47.

³² Rayy atau Rhages adalah kota yang dibuka oleh Nu'aym ibn Muqarran, pada masa 'Umar ibn al-Khattāb. Di kota ini, khalifah terkenal Hārūn al-Rashid dilahirkan. Lihat: Amīn Wāsif Bek, *Mu'jam al-Kharīṭah al-Tārikhīyyah li al-Mamālik al-Islāmiyyah*, ed. Ahmad Dhakī Bashā (Cairo: Maktabat al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1998), 60.

³³ Al-Shaybāni, *al-Iktisāb fī al-Riḥg al-Mustatāb*, 63-65.

³⁴ Al-Shaybāni, *al-Iktisāb fī al-Riḥg al-Mustatāb*, 78-98.

³⁵ Al-Shaybāni, *al-Iktisāb fī al-Riḥg al-Mustatāb*, 114-120.

³⁶ Liat Kulik, "Jobless Men and Women: a Comparative Analysis of Job Search Intensity, Attitudes Toward Unemployment, and Related Responses," *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, vol. 73, no. 4 (2000): 487-500.

terhadap tingkat pengangguran. Di antara penelitian itu apa yang ditemukan oleh Andrew Clark dan Orsolya Lelkes misalnya. Mereka menyampaikan bahwa secara konsisten, tingkat pengganti pengangguran (*unemployment replacement*) pada masyarakat religius di seluruh Eropa cenderung lebih rendah. Ini berimplikasi bahwa penganggur religius cenderung kurang aktif dalam mencari pekerjaan. Namun demikian, penelitian ini tidak menutup sama sekali peran agama dalam konteks lain. Peran yang ditemukan barangkali akan berbeda dalam konteks sistem ekonomi-sosial yang lain.³⁷

Terkait doktrin agama Islam, ada beberapa kalangan yang "sedikit menyentuh" korelasi konsepsi *zuhd* dan pengangguran. Monzer Kahf dalam artikelnya "*The Economic Role of State in Islam*",³⁸ misalnya yang meluruskan pemahaman—yang menurutnya—negatif, terkait dengan doktrin *zuhd* atau 'asketisme' Islam. Demikian juga M. Umer Chapra dalam "*Monetary and Fiscal Economics of Islam*"³⁹ yang kembali menegaskan bahwa pada dasarnya, Islam bukan agama pertapa, tetapi Islam memiliki pandangan yang positif terhadap kehidupan berdasarkan prinsip manusia sebagai khalifah di bumi. Sayangnya, Chapra dalam hal ini terjebak pada logika-linier bahwa prinsip kekhalifahan sama dengan atau identik dengan kekayaan, kelayakan hidup, dan tidak kesulitan. Padahal prinsip kekhalifahan di muka bumi sesungguhnya dan faktanya tidak selalu identik dengan kehidupan yang layak, yang tentu bersifat profan. Di samping itu, penulis belum menemukan penelitian kuantitatif terkait hubungan tingkat pengangguran dan persepsi terkait *zuhd*.

Terlepas dari beberapa penelitian di atas, bila merujuk pada keterangan di naskah "*al-Kasb*", al-Shaybāni memotret fenomena pengangguran yang nampaknya justru dilahirkan oleh pemahaman terkait sejauh mana kedudukan "usaha" dalam kehidupan muslim. Hal ini terlihat dari munculnya gerakan keagamaan yang menyerukan sikap berpangku tangan atau tidak bekerja sebagai perwujudan dari iman yang mendalam dan berserah diri kepada

³⁷ Andrew Clark & Orsolya Lelkes, "Deliver Us from Evil: Religion as Insurance," *Paris-Jordan Sciences Economiques's Working Paper*, no. 43 (2005): 1-38.

³⁸ Monzer Kahf, "The Economic Role of State in Islam," *paper presented at conference on Islamic Economics in Dakka* (1991): 9.

³⁹ *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, ed. Mohamed Ariff (Jeddah: International Centre For Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 2008), 145-186.

Tuhan (*tawakkul*). Michael Bonner⁴⁰ menangkap realitas ini dan menyampaikannya dengan cukup gamblang dalam artikelnya.

Al-Shaybānī sendiri mengungkap bahwa pengangguran yang terjadi pada saat itu disebabkan pula oleh adanya pemahaman keagamaan yang keliru terkait konsep zuhud atau asketisme. Dalam hal ini, asketisme dimaknai oleh sebagian penganut agama Islam sebagai gaya hidup yang nyaris meninggalkan kehidupan duniawi. Pemahaman ini pada gilirannya berimplikasi terhadap pendekatan terhadap interaksi sosial, di antaranya dalam bekerja mencari nafkah.

Dalam menanggapi hal itu, al-Shaybānī sembari menggunakan pendekatan *fiqh*, menandakan bahwa mencari nafkah itu dapat terbagi pada tiga kategori: (1) wajib: yaitu atas setiap yang mampu melakukannya, untuk memenuhi “kebutuhan kifāyah” dirinya dan orang yang di bawah tanggungjawabnya;⁴¹ (2) terpuji (*mandūb*): yang ditujukan untuk memenuhi “kebutuhan kifāyah” selain orang yang dibawah tanggungannya, maksudnya adalah selain orang tua, anak dan isteri-nya. Kategori kedua ini dapat berlaku dan legal bila kategori pertama telah terlaksana⁴²; (3) boleh (*mubāh*): aktivitas mencari nafkah dengan penggunaan yang selebihnya dari dua kategori di atas. Al-Shaybānī membangun argumen untuk kategori ketiga, bercermin pada sejarah para orang-orang saleh yang terdahulu.

Dari kategorisasi ini, kita dapat melihat bahwa al-Shaybānī belum menggunakan terminologi “*awlāwiyah*” yang terkait dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ia nampaknya menginisiasi terminologi “kifāyah” yang artinya cukup. Ini berarti bila dinilai sudah cukup, kebutuhan-kebutuhan ekonomis berupa sandang-pangan-papan, telah terpenuhi. Namun tentu saja, penilaian cukup ini

sendiri menghajatkan adanya ukuran yang jelas.

Tawaran pendekatan persepsi al-Shaybānī nampaknya juga berkelindan dengan ranah ideologis. Latar belakang yang terlihat adalah terkait dengan adanya keyakinan sementara kelompok masyarakat bahwa bekerja mencari rezeki itu mengurangi kualitas “*tawakkal*” (totalitas dalam menyerahkan jiwa) kepada Tuhan. Katakanlah, sikap al-Shaybānī merupakan respon (*raddat fi’i*) terhadap realitas yang dianggapnya tidak ideal. Dalam sejarahnya kalangan di atas sering mendaku sebagai orang-orang suci (*sūfi*), meski di sisi lain tidak sedikit kalangan *sūfi* yang berkerja mencari rezeki dan menolak klaim bahwa kerja mengurangi kualitas tawakkal, karena baik “tawakkal” ataupun “berusaha” (*kasb*) itu diperintahkan oleh Tuhan.⁴³ Dengan demikian, keduanya, baik “kasb” atau “tawakkal” adalah dua entitas berbeda dengan ranah dan aktualisasi yang berbeda pula.

Dalam bukunya al-Kasb, juga disebut-sebut nama “al-Karāmiyah” yang didentifikasi sebagai kalangan yang beranggapan bahwa mencari rezeki untuk keperluan mendasar itu mubah atau “boleh-boleh saja”. Meski ada perdebatan terkait siapa al-Karamiyah yang dimaksud,⁴⁴ dapat ditegaskan bahwa al-Shaybānī dengan tegas menolak pendapat semacam ini. Argumentasi utama yang digunakan oleh al-Shaybānī, selain dalil-dalil normatif yang berasal dari teks-teks agama, adalah kedudukan mencari rezeki yang halal demi kebutuhan mendasar adalah “sistem vital semesta” (*nizhām al-‘alam*).⁴⁵ Dengan inilah, semesta dapat bertahan hingga titik terakhirnya.

⁴³ Di antara kalangan kedua adalah: al-Fudayl ibn ‘Iyād (w. 187 H.), Ma‘rūf al-Karkhī (w. 200 H.), Abū Sulaymān ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Atiyyah al-Dārānī (w. 215 H.), Bishr ibn al-Hārith al-Hāfi (w. 227 H.).

⁴⁴ Sebagian peneliti seperti Michael Bonner berpendapat bahwa al-Karramiyyah yang dimaksud adalah sekte teologis pengikut ibn Karrām (w. 190/806-255/869). Sementara yang lain seperti Mahmūd ‘Arnūs berpendapat bahwa al-Karramiyyah adalah salah satu aliran sufi namun tidak menentukannya secara distingtif (Lihat: Michael Bonner, “the Kitāb al-Kasb attributed to al-Shaybānī: Poverty, Surplus, and the Circulation of Wealth,” *Journal of the American Oriental Society*, 121, 3 [2001]: 413-414; Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Riḡq al-Mustatāb*, Mahmūd ‘Arnūs, ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 27-28.

⁴⁵ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Riḡq al-Mustatāb*, 29.

⁴⁰ Michael Bonner, “the Kitāb al-Kasb Attributed to al-Shaybānī: Poverty, Surplus, and the Circulation of Wealth,” *Journal of the American Oriental Society*, 121, 3,

⁴¹ Al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Riḡq al-Mustatāb*, 57. Salah satu argumentasi yang disampaikan adalah Hadis Nabi yang berbunyi: من أصبح أمنا في سريره معافا في بدنه عنده قوت يومه من أصبح أمنا في سريره معافا في بدنه عنده قوت يومه (H.R. al-Tirmidhī, vol. 4, no. 2449, 5; Sunan Ibn Mājah, vol. 4, no. 4141, 442. Kualitas hadis dinilai “*Hasan Gharib*”).

⁴² Al-Shaybānī, *al-Iktisāb*..., 59. Sebagian ulama yang lain seperti al-Sarakhsī cenderung lebih memilih bahwa setelah kategori pertama terpenuhi, aktivitas ibadah ritual adalah lebih diutamakan ketimbang menyibukkan diri dengan mencari nafkah (Lihat: *al-Kasb*, 47).

Yang menarik, pendekatan persepsi ini dapat dipandang memiliki implikasi terhadap angka pengangguran. Ahmad Sulaymān Mahmūd Khasāwinah, misalnya, melihat hal senada. Dikatakannya bahwa perspektif al-Shaybānī ini berarti ide untuk mengakhiri problematika pengangguran.⁴⁶ Dalam hal ini, surplus output pekerja sejatinya dialokasikan untuk kegiatan filantropi, sehingga income masyarakat kurang mampu dapat menempati batas “kifāyah” atau berkecukupan. Berbeda dengan Ahmad Sulaymān, J. C. Wichard secara persuasif membangun argumentasi bahwa buku al-Kasb mengajak kepada nilai yang adil di antara sikap asketis yang ekstrim dan sikap “pamer/berlagak” (*ostentatious*) dalam hal terkait pendapatan dan konsumsi. Di samping itu, Wichard lebih menekankan perhatian generasi awal dari para ahli hukum Islam aliran Hanafi, terkait krusialnya masalah kemiskinan.⁴⁷ Dengan demikian, Wichard tidak memsberikan perhatian terhadap masalah pengangguran, secara khusus.

Hal senada dengan Wichard dilakukan oleh Michael Bonner yang menekankan pada titik kemiskinan dan sedekah (*almsgiving*). Yang membedakan Wichard dengan Bonner setidaknya adalah perspektif terkait dua hal: (1) penekanan Bonner yang lebih mendalam terkait kemiskinan dan sedekah, (2) pendekatan filologis cukup mendalam yang digunakan oleh Bonner, yang nampaknya tidak dilakukan oleh Wichard. Ini membuat studi Richard terhadap *al-Kasb* agak simplistik, tidak komposit.⁴⁸ Meskipun demikian, Bonner tidak mendiskusikan tema pengangguran (*al-batalah*) yang sejatinya berkolerasi dengan topik kemiskinan.

Beberapa perspektif cendikia di atas menunjukkan bahwa karya al-Shaybānī memiliki berbagai dimensi. Maka sah-sah saja bila dalam perspektif pasar pekerja, pendekatan persepsi ini dapat dilihat dalam dua sisi baik dari sisi penawaran

ataupun permintaan. Pendekatan lain untuk lebih memudahkan gambarannya adalah berbagai analisis terkait “pengaruh persepsi terhadap permintaan dan penawaran dalam pasar pekerja”. Beberapa tulisan dan penelitian menemukan adanya korelasi—baik yang positif ataupun negatif—antara persepsi dan mekanisme *supply* dan *demand*.

c. Spesialisasi dan “Training”

Pada kesempatan yang lain, al-Shaybānī juga mengintroduksi adanya pembagian kerja dan spesialisasi.⁴⁹ Gagasan ini mendapatkan relevansi dalam kerangka pengangguran struktural yang disebabkan absennya titik temu antara struktur angkatan kerja berdasarkan keterampilan, jenis pekerjaan, industri, dan lokasi geografis dengan struktur permintaan kerja. Hal inilah yang disebut nobelis 2010, Peter Diamond sebagai “*mismatch*” yang memerlukan transformasi pada ranah pekerja dari yang sebelumnya merupakan “pekerja konstruksi” menjadi “pekerja yang mempabrikasi” (*manufacturing workers*).⁵⁰ Dalam perspektif *supply* dan *demand* pada pasar pekerja, pengangguran jenis ini memang disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam komposisi dan ketidakcocokan pada penawaran dan permintaan para tenaga kerja. Ketidakcocokan ini sendiri dapat terjadi saat meningkatnya permintaan terhadap suatu jenis pekerjaan, sementara permintaan jenis suatu pekerjaan lain justru menurun. Hal ini ditambah dengan tidak lancarnya fungsi penyesuaian dari mekanisme penawaran (*supply*).⁵¹

Dalam konteks pasar pekerja, adanya *mismatch* atau pengangguran struktural tersebut dapat disebabkan setidaknya oleh empat hal: (1) imobilitas kerja yang terjadi karena kesulitan dalam pembelajaran kemampuan baru yang dituntut dalam pekerjaan, seperti pembelajaran untuk perubahan dalam teknologi dan industri baru;⁵² (2) imobilitas

⁴⁶ Ahmad Sulaymān Mahmūd Khasāwinah, *al-Fikr al-Iqtishādī ‘inda al-Shaybānī*, 233.

⁴⁷ J. C. Wichard, *Zwischen Markt und Moschee: Wirtschaftliche Bedürfnisse und Religiöse Anforderungen im Frühen Islamischen Vertragsrecht* (Paderborn: 1995), 37-44.

⁴⁸ Pada kenyataannya, beberapa naskah al-Kasb yang ditemukan setidaknya tidak lepas dari dua orang komentator atau penukil. Mereka adalah Muhammad ibn Sammā’ah dan al-Sarkhasī (Michael Bonner, “the Kitāb al-Kasb attributed to al-Shaybānī: Poverty, Surplus, and the Circulation of Wealth” *Journal of the American Oriental Society*, 121, 3 [2001]: 410-427).

⁴⁹ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, 40.

⁵⁰ Peter Diamond, “Unemployment, Vacancies, Wages,” *Nobel Lecture* : 8.

⁵¹ Lihat: Campbell R. McConnell, et al., *Contemporary Labor Economics*, 7th Edition (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006), 546; Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics*, 8th Edition (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005), 655.

⁵² Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides, “Unemployment Responses to ‘Skill-biased’ Technology Shocks: the Role of Labour Market Policy,” *The Economic Journal*, vol. 109, no. 455 (1999): 245-265.

geografi yang terjadi dikarenakan kesulitan akses daerah;⁵³(3) perubahan teknologi. Karena bila terdapat pengembangan dalam menghemat teknologi kerja, maka umumnya akan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja;⁵⁴(4) perubahan struktural dalam perekonomian.⁵⁵Dalam konteks Abbasiyah era al-Ma'mūn, ini dapat dilihat dari adanya pekerja non-Arab yang pada umumnya bekerja di berbagai sektor.

Dengan demikian, apa yang digagas oleh al-Shaybānī terkait spesialisasi dan pembagian kerja dapat dipandang sebagai strategi terhadap problematika ketidakcocokan dan perubahan-perubahan dalam pasar kerja. Namun, untuk melihat lebih utuh keadaan fikiran (*state of mind*) al-Shaybānī maka perlu didedahkan konteks perekonomian yang terjadi saat itu.

Setidaknya ada empat varian spesialisasi yang disebut oleh al-Shaybānī dalam al-Iktisāb. Empat ini yaitu: (1) *al-ijārah* ['leasing', yang dapat mewakili sektor jasa]; (2) *al-tijārah* [perdagangan]; (3) *al-zirā'ah* [pertanian]; dan (4) *al-sinā'ah* [perindustrian].⁵⁶Empat varian pekerjaan ini dapat dilihat sebagai sektor-sektor ekonomi utama pada jaman-nya. Berbagai laporan sejarah mengungkap bahwa pada masa awal Negara Abbasiyah hingga masa al-Ma'mūn, pada umumnya empat sektor ekonomi tersebut berkembang dengan cukup pesat.

Sektor pertanian yang berasal dari Irak (*al-sawād*), misalnya, menyumbang sekitar 120 juta dirham atau 1/3 pemasukan Negara. Produk pertanian utama dan terbesar dari daerah ini adalah *hintab* (gandum dengan sisi yang tidak halus) dan *sha'ir* (gandum dengan sisi yang halus). Dokumentasi sejarah, seperti *al-Fakhrī*, menyimpulkan bahwa pada masa dinasti Umayyah (terutama pada pra-keruntuhan) sektor pertanian tidak mendapat posisi yang layak dalam "blue print" perekonomian Negara. Bahkan, masyarakat petani

cenderung mendapat perlakuan kasar dan tidak layak dari patron pemungut pajak. Maka wajarlah bila masyarakat melawan dengan melakukan mogok "mengolah lahan", sehingga sektor pertanian dan banyak tanah malah terbengkalai, tidak produktif. Hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah Abbasiyah pada periode pertama.⁵⁷Dalam hal ini, pakar sejarah dan etnografi Ibnu al-Athīr (w. 630 H./ 1233 M.) memuji perlakuan penguasa masa-masa pertama Abbasiyah yang mengaktualkan rasa aman, mengayomi masyarakat, dan meningkatkan pembangunan.⁵⁸

Untuk lebih memahami sektor pertanian ini maka perlu disebutkan bahwa tanah pada masa pemerintahan Abbasiyah paling tidak dikategorikan pada lima jenis: (1) *al-arādi al-sultāniyyah* (tanah pemerintah, *public property*); (2) *arādi al-milk* (tanah hak milik); (3) *al-arādi al-mushā'ah* (tanah tanpa pemilik); (4) *arādi al-waqf* (tanah wakaf); dan (5) *al-iqtā'āt* (hasil persengketaan).⁵⁹Tanah pemerintah umumnya berasal dari tanah hasil sitaan (*confiscation*) dari pemerintahan Umayyah, kemudian semakin meluas lewat pembelian, penyitaan dari pegawai yang dipecat, meninggal, atau sebab yang lain. Tanah ini, pada umumnya dapat disewakan oleh pemerintah kepada investor, sebagaimana pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini.

Adapun tanah hak milik pribadi (*'private-ownership land'*) berasal dari berbagai latar belakang. Secara historis, hak milik ini diberikan oleh penguasa terkait penyitaan⁶⁰atau terkait dengan pengolahan tanah tak bertuan (*ihyā' al-mawāt*) dan pengurukan rawa-rawa (*impolder*) yang sangat dianjurkan oleh pemerintah.⁶¹Sebagai contoh,

⁵⁷ Bandingkan dengan: Jaakko Hämeen Anttila, *The Last Pagans of Iraq: Ibn Wabshīyya and His Nabatean Agriculture* (Leiden: Brill, 2006).

⁵⁸ Ibn al-Athīr, *al-Kamil fī al-Tarikh*, ; Bandingkan dengan Christian Lange, *Justice, Punishment, and the Medieval Muslim Imagination* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

⁵⁹ Lihat misalnya: Ibn Qudāmah, *al-Kharāj wa Shun'at al-Kitābah*, vol. 9 (Leiden: Maktabat al-Jugrāfiyyah al-'Arabiyyah, 1889), 241; Muhammad ibn 'Abdūs al-Jihshayārī, *al-Wuzarā' wa al-Kuttāb* (Cairo: t.p., 1928), 90; al-Khawārizmī, *Mafāhib al-'Ulum* (Cairo: t.p., 1930), 39; Urayb ibn Sa'īd al-Qurtubī, *Silat al-Tabarī* (Leiden: De Goge, 1897), 145; al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah* (Cairo: Dār al-Salām), 183.

⁶⁰ Al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah*, 186-187.

⁶¹ Ibn Miskawayh, vol. 2, 88; Ibn Qudāmah, *al-Kharāj wa Shun'at al-Kitābah*, 241; al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah*, 174.

⁵³ Quentin David, Alexander Janiak, & E. Wasmer, "Local Social Capital, Geographical Mobility, and Unemployment in Europe," *IZA Working Paper* (2007): 1-65.

⁵⁴ Udo Kreickemeier & D. Nelson, "Fair Wages, Unemployment, and Technological Change in a Global Economy," *Research Paper of Leverhulme Centre*, no. 5 (2005): 1-30.

⁵⁵ Jan Fagerberg, "Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth: a Comparative Study," *Journal of Structural Change and Economic Dynamics*, vol. 11 (2000): 394-411.

⁵⁶ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riżq al-Mustatāb*, 40.

pengolahan tanah-tanah tak bertuan di kawasan sekeliling Basrah⁶² dan pengeringan daerah rawa (*al-mustanqa'at*) di bilangan *al-Batihah*.⁶³ Prosedur kepemilikan lain yaitu melalui penjualan tanah perbendaharaan Negara atau tanah pemerintah yang dijual karena faktor ekonomi.⁶⁴ Masing-masing dari laporan Ibn Miskawayh (w. 421 H./ 1030 M.) dan al-Tanūkhī (w. 384 H./ 994 M.) menunjukkan adanya minat yang besar dari berbagai kalangan, baik pegawai negara ataupun non pegawai untuk berinvestasi pada sektor tanah ini karena sifat kepemilikannya yang mutlak (*freehold*) dan tingkat *return* yang diinginkan (*expected rate of return*) relatif menjanjikan.⁶⁵ Meskipun di sisi lain, juga ada kewajiban atas mereka seperti membayar pajak dan membayar iuran pemeliharaan saluran air yang melewati tanah mereka.⁶⁶ Laporan lain seperti dari ensiklopedis Yāqūt al-Hamawī (w. 626 H./1229 M.) dan sejarawan al-Sābī mengindikasikan bahwa plot-plot tanah yang luas dan terpencar justru banyak dimiliki oleh para elit pemerintah. Misalnya, seorang menteri pada pemerintahan Harūn al-Rashīd dan al-Amīn yang bernama 'Alī ibn 'Isā (w. 195 H./810 M.) memiliki tanah di kawasan Rab'ah, Mosul, Sawād, Damaskus, dan Mesir.⁶⁷ Kedudukan para elit juga dimanfaatkan oleh sementara pemilik tanah untuk memproteksi kepemilikan mereka dan terkadang untuk mengurangi beban pajak (*iljā*). Caranya dengan meminta kepada elit tertentu agar bersedia didaftarkan namanya sebagai pemilik tanah tersebut, dengan kompensasi tertentu.⁶⁸ Namun kadang realitas berbanding terbalik. Sementara elit justru berhasil menguasai penuh kepemilikan tanah dan menganggangi kepercayaan yang diberikan

pada mereka. Ini misalnya terjadi di berbagai wilayah seperti Persia, Zinjān, al-Jibāl dan Irak sendiri.⁶⁹

Sementara tanah tanpa pemilik (*al-mushā'ab*) biasanya juga disebut sebagai tanah mati. Pada umumnya, tanah ini terbiarkan karena dianggap tidak menguntungkan atau bernilai ekonomis. Secara utilitas, tanah ini tidak ekonomis karena banyak faktor, misalnya perlu biaya yang cukup untuk mengolahnya, atau bisa juga karena letak tanah yang jauh dari tempat tinggal penduduk, dan faktor-faktor lainnya. Dari penelusuran penulis, tak banyak narasi sejarah yang mengungkap tanah ini secara khusus, hanya pragmen-pragmen berserakan terkait pengeringan daerah rawa (*mustanqa'at*) di daerah al-Batihah seperti laporan al-Māwardī dan pemberdayaan tanah-tanah mati di sekitar Basrah seperti catatan yang bersumber dari al-Istakhrī dan Ibn Hawqal, seperti ditulis sebelumnya.

Jenis tanah berikutnya adalah tanah wakaf. Secara tradisi, tanah ini diperuntukkan khusus untuk keperluan keagamaan. *Return* yang didapat dialokasikan untuk keperluan terkait (a) tanah suci (Mekkah dan Madinah), (b) pasukan perang resmi (*al-jihād*), (c) orang fakir dan yang miskin, (d) anak yatim, (e) tebusan untuk membebaskan perbudakan, (f) biaya membangun mesjid dan pos pertahanan Negara, (g) atau hal-hal yang bermanfaat lainnya.⁷⁰ Ini berarti tanah wakaf dapat bersifat produktif, tidak seperti pada umumnya yang terjadi di Indonesia saat ini.

Sementara tanah pertanian (*farmland*) umumnya terletak pada tanah pemberian (*iqta'at*): yaitu tanah hasil vonis pemerintah terkait sengketa pihak-pihak terkait. Ibn Miskawayh dan al-Tabarī mencatat bahwa tanah ini—meski secara yuridis harus berasal dari tanah pemerintah—tetap saja pada praktiknya tanpa aturan yang definitif.⁷¹ Ketika al-Muqtadir menjabat sebagai khalifah, Negara Abbasiyah diguncang krisis ekonomi. Akibatnya, tanah-tanah hasil sengketa direkuisisi pemerintah untuk mengatasi krisis.⁷² Ini berarti tanah-tanah

⁶² Al-Ishtakhrī, *Masālik al-Mamālik*, 80; Ibn Hawqal, *al-Masālik wa al-Mamālik*, 239.

⁶³ Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, 173.

⁶⁴ Ahmad ibn 'Umar ibn Rustah, *al-'alāq al-Nafīṣah* (Leiden: Maktabat al-Jugrāfiyyah al-'Arabiyyah, 1892), 150.

⁶⁵ Ibn Miskawayh, *Tajārib al-Umam*, vol. 1, 4-253, 238-241; al-Muhsin ibn 'Alī ibn Muhammad al-Tanūkhī, *al-Faraj ba'da al-Shiddah*, vol. 1 (Cairo: t.p., 1904), 93.

⁶⁶ Hilāl al-Sābī, *Tuhfat al-Umarā' bi Tarikh al-Wuzarā'* (Cairo: Maktabat 'Abd al-Sattar Faraj Ahmad, 1958), 257; al-Tabarī, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulūk*, vol. 3, 2153.

⁶⁷ Hilāl al-Sābī, *Tuhfat al-Umarā' bi Tarikh al-Wuzarā'*, 304-321, Yāqūt al-Hamawī, *Mu'jam al-Udabā'*, vol. 5, 278.

⁶⁸ Lihat: George Zaydan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 2, 130; Al-Ishtakhrī, *Masālik al-Mamālik*, 128; al-Muhsin ibn 'Alī ibn Muhammad al-Tanūkhī, *al-Faraj ba'da al-Shiddah*, vol. 8, 76; Muhammad ibn 'Abdūs al-Jihshayārī, *al-Wuzarā' wa al-Kuttāb*, 118.

⁶⁹ Al-Balādhurī, *Futūḥ al-Buldān* (Leiden: t.p., 1866), 311, 323, 371; al-Ishtakhrī, *Masālik al-Mamālik*, 158.

⁷⁰ Hilāl al-Sābī, *Tuhfat al-Umarā' bi Tarikh al-Wuzarā'*, 286; Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tarikh*, vol. 8, 182; Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Tabātaba ibn al-Taqtaqī, *al-Fakhri fī al-Adāb al-Sultāniyyah*, 364; Hilāl Rabī'at al-Ra'yi, *Ahkām al-Waqf* (Heydar Abad, 1327 H.), 10-12.

⁷¹ Ibn Miskawayh, *Tajārib al-Umam*, vol. 1 (Cairo, t.p., 1920), 136; al-Tabarī, *Akhbār al-Rusul wa al-Mulūk*, vol. 3, 2153.

⁷² 'Urayb ibn Sa'īd al-Qurtubī, *Silat al-Tabarī*, 145.

pemberian dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemerintah atau pemberi tanah.

Tanah jenis ini, bila dilihat dari nilai legitimasinya, dapat dikategorikan pada dua varian: (1) tanah pemberian untuk hak kepemilikan (*proprietary rights*); dan (2) tanah pemberian untuk hak pengusahaan (*land cultivation rights*).⁷³ Namun demikian, karena struktur masyarakat yang masih bersifat patriarkis, yang malah berlaku adalah hak legitimasi ini sangat bergantung pada status sosial pemilik tanah. Ketika tanah diberikan oleh pemerintah kepada kalangan pegawai pemerintah maka tanah ini dapat dianggap sebagai “tanah (pemberian) sipil” (*iqta’at madaniyyah*).⁷⁴ Atau ketika pemerintah memberikan tanah kepada kalangan profesional seperti penyair, musisi, ilmuwan, atau yang semacamnya, maka tanah itu dapat dikategorikan sebagai “tanah (pemberian) spesial” (*iqta’at khashah*).⁷⁵ Juga terdapat tanah pemberian dari pihak militer (*iqta’at askariyyah*),⁷⁶ dan tanah pemberian yang khusus diberikan oleh khalifah kepada elit, seperti para panglima perang (*iqta’at al-khalifah*).⁷⁷

Dari beberapa narasi sejarah, nampaknya “tanah pemberian special” merupakan tanah dengan kekuatan hukum (*force of law*) terkuat. Tidak mengherankan bila tidak sedikit kalangan profesional tertentu yang mengharapkan mendapat tanah pemberian jenis ini—dan berusaha mendekati penguasa. Tanah jenis ini pada praktiknya juga mencakup tanah yang ditinggalkan dan tanah mati yang akan diberdayakan. Para petani diberikan oleh pemegang hak pemberian untuk mengolah tanah. Biasanya pemegang hak tanah pemberian yang menyediakan biaya pengolahan dan bibit tanaman tertentu. Ketika telah panen, maka sebagian hasil tahunannya dibayarkan ke kas negara. Setelah itu, para pemegang hak dapat menikmati hak

kepemilikan (*proprietary rights*) penuh—termasuk di dalamnya dapat mewariskan kepemilikan ini, bebas pajak lain (*tax-exempt*), dan terhindar dari intervensi pemerintah.⁷⁸

Meski demikian kondisi para pemilik tanah pemberian spesial, keadaan para petani pengerja lahan justru tidak lebih baik. Ibnu Miskawayh menulis bahwa meskipun petani memiliki peran strategis dalam pemasukan negara, kesejahteraan mereka tidak pernah diperhatikan dengan serius (*lam yu’khabdh kbayr al-fallah daiman bi ‘ayn al-i’tibar*).⁷⁹ Dalam bahasa lain, belum ada strategi integral dalam politik pertanian. Yang terjadi justru politik pertanian sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan personal baik dari khalifah, kemudian wazir, dan selanjutnya amir.⁸⁰ Implikasinya, kebijakan-kebijakan pemerintah biasanya akan selalu berubah sepanjang terjadinya pergantian kepala pemerintahan.

Struktur penduduk kawasan pertanian al-Sawād Irak, misalnya, mayoritas terdiri atas kalangan yang lazim disebut “petani dusun” (*nabti*) yang berasal dari non-arab yang masuk Islam dan masih mempertahankan tradisi mereka.⁸¹ Kalangan ini menempati simpul-simpul perkampungan yang laksana terisolir dari perkembangan dan pembangunan perkotaan. Tidak ada alih teknologi (*transfer of technology*) dalam bidang pertanian, sebagai efek turunan dari pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kalaupun ada, maka pengaruh yang menerpa perkampungan dirasa sangat sedikit.⁸²

Dalam ruang dan konteks ironi sektor pertanian inilah, inisiasi al-Shaybānī terkait urgensi pertanian menjadi relevan. Seakan-akan al-Shaybānī memprotes kebijakan dan sikap pihak-pihak yang dianggapnya hanya mengambil keuntungan dari sektor pertanian namun tidak menaruh perhatian atas kesejahteraan dan pengembangan (keahlian) dalam sektor ini. Sembari menukil hadis

⁷³ Al-Khawārizmī, *Mafāhīh al-‘Ulūm*, 60; al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, 7-186; Al-Qalaqshandī, *Subh al-A‘ashā*, vol. 13, 113-115.

⁷⁴ Ibn Miskawayh mencatat bahwa pada tahun 325 H./936 M., Ibn Rāiq, kepala pemerintahan daerah Bajkam, Turki mengajukan tanah pemberian yang *return*-nya mencapai 50 ribu Dinar/tahun kepada pegawai dinas penjaminan kawasan al-Ahwāz (Ibn Miskawayh, *Tajārib al-Umam*, vol. 1, 374).

⁷⁵ Al-Isfahānī, *al-Aghānī*, vol. 5, 168; vol. 9, 9-348; al-Khatīb al-Baghdādī, *Tārikh Baghdād*, vol. 6, 368.

⁷⁶ Al-Dūrī, *Dirāsāt fi al-‘Uṣūr al-‘Abbāsīyyah al-Mutaakhhirah*, 258.

⁷⁷ Ibn Miskawayh, *Tajārib al-Umam*, vol. 2, 97, 98-99.

⁷⁸ Lihat: al-Qalaqshandī, *Subh al-A‘ashā*, vol. 13, 123-131; 139-143; al-Sūlī, *Adab al-Kuttāb*, 212; al-Khatīb al-Baghdādī, *Tārikh Baghdād*, vol. 8, 493.

⁷⁹ Ibn Miskawayh, *Tajārib al-Umam*, vol. 1, 27.

⁸⁰ ‘Abd al-‘Azīz al-Dūrī, *Tārikh al-‘Irāq al-Iqtisādī fi al-Qarn al-Rabi’ al-Hijri*, Cet. 3 (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1995), 59.

⁸¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Bannā al-Maqdisī, *Ahsan al-Taqāsīm fi Ma’rifat al-Aqālīm*, 108; al-Muhsin ibn ‘Alī ibn Muhammad al-Tanūkhī, *al-Faraj ba’da al-Shiddah*, vol. 8, 100.

⁸² Bandingkan dengan keterangan sejarawan George Zaydān dalam *Tārikh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 2, 179.

Nabi terkait urgensi “sektor bumi”, al-Shaybānī sebenarnya menekankan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi petani.⁸³

Ini juga berarti bahwa untuk kawasan penangguran di pedesaan (*rural unemployment*), pemberdayaan sektor pertanian menjadi sangat signifikan.

Pos strategis ekonomi yang lain adalah berasal dari aktivitas perdagangan. Meski kita belum menemukan total nominal pemasukan defenitif dari sektor perdagangan ini, namun sebagai ilustrasi dapat disebut bahwa pajak penghasilan perdagangan laut (*a'ashār al-sufun*) dari salah satu saudagar laut yang bernama Hasan ibn al-'Abbās, mencapai 100 ribu Dinar dalam satu tahun.⁸⁴Bila mengingat skala perdagangan internasional Abbasiyah yang telah menembus ujung India dan China, maka tentu saja pemasukan dari sektor ini cukup besar.⁸⁵Di antara komoditi dagang yang cukup besar memberi pemasukan untuk kas Negara adalah berasal dari hasil bumi (*cash crop*) baik yang berada di permukaan atau yang ada di perut bumi. Pajak yang diperuntukkan adalah seperlima (*akbmās al-ma'ādin*) dan berasal dari berbagai penjuru negeri, seperti emas dan perak di daerah Transoxiana dan Karman, Zabarjad (batu berwarna *aquamarine*) dari kawasan selatan Nil.⁸⁶Al-Maqdisī, misalnya, bernarasi bahwa harga jaminan produk batu mulia Pirus dari tambang-tambang Naisabur mencapai angka 758.720 Dirham.⁸⁷

Sementara itu, ada jenis cukai produk industri (*mukūs*) dan pajak daerah (*marāsīd*) yang turut menyumbang pendapatan Negara. Namun sebagaimana sebelumnya, kedua jenis pendapatan dari sektor ini jumlah nominalnya tidak diketahui secara pasti namun dapat disinyalir bahwa jumlahnya cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari narasi al-Maqdisī dan Ibn Hawqal dalam catatan sejarah mereka. Al-Maqdisī menulis cukai yang dibebankan pada setiap proses industri pemintalan kain di daerah Mesir, produk minyak, dan lain-lain. Ia juga merekam pendapatan seorang petugas pabean di kawasan Tunais di Mesir yang

menarik cukai seribu Dinar per harinya.⁸⁸Sementara Ibnu Hawqal memotret dengan cukup baik pajak daerah Azerbejan yang mencapai angka 1 juta Dirham dalam setahun. Pajak ini meliputi sektor perbudakan, transportasi, dan peternakan.⁸⁹

Adapun sektor jasa, maka dapat dilihat dari bayaran yang dibebankan kepada para penyewa tanah pemerintah (*al-mustaghballāt*). Tanah ini digunakan sebagai lahan usaha baik untuk pasar, tempat menginap, dan lain-lain. Sejarawan Ibnu Khurdadhbih menceritakan bahwa *return* yang didapatkan pemerintah dari pasar, tempat peristirahatan, dan Balai Logam (*dawr al-darb*) yang berada di kota Baghdad mencapai 1,5 juta Dirham dalam setahun.⁹⁰Daerah Samarra di Irak menyumbang sekitar 10 juta Dirham yang berasal dari *return* dan hasil sewa tanah pemerintah di sektor jasa yang merupakan investasi pemerintah ini menempati pos yang cukup strategis karena memberi *income* yang cukup besar, meski porsinya tidak sebesar apa yang dihasilkan dari sektor pajak *al-kharāj* (tanah dan produk pertanian).⁹¹Terkait sektor ini, al-Shaybānī menekankan akan pentingnya internalisasi nilai ketaatan pada Tuhan.⁹²

Dari uraian sejarah di atas, kita dapat melihat bahwa sektor pertanian mendapat porsi terpenting dalam peta perekonomian Negara Abbasiyah. Maka wajar bila kemudian, al-Shaybānī menyebut pertanian sebagai pekerjaan yang terbaik karena manfaat total (*total utility*) yang dihasilkan juga paling besar. Manfaat ini tidak hanya dikalkulasikan dari segi materil namun juga dari segi adanya nilai filantropi yang mencakup hasil-hasil pertanian (*agricultural produces*) yang susut karena dimakan oleh hama atau binatang lain.⁹³

Penekanan terhadap adanya spesialisasi dapat dilihat dari lanjutan uraiannya setelah gagasan pembagian kerja. Dalam hal ini al-Shaybānī kemudian menginisiasi diskursus “*thalab al-'ilm*” (menuntut ilmu pengetahuan). Diktum populis yang disampaikan oleh dia adalah “*talab al-kasb faridatun kamā anna talab al-'ilmi faridah*” (menuntut

⁸³ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 40.

⁸⁴ Ibn Hawqal, *al-Masālik wa al-Mamālik*, efilog.

⁸⁵ George Zaydān, *Tarikh al-Tamaddun al-Islāmi*, vol. 2, 86.

⁸⁶ Ibrāhīm ibn Muhammad al-Fārisī al-Istakhri, *Masālik al-Mamālik*, 51.

⁸⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Bannā al-Maqdisī, *Absan al-Taḳāsim fī Ma'rīfat al-Aqālīm*, 341.

⁸⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Bannā al-Maqdisī, *Absan al-Taḳāsim fī Ma'rīfat al-Aqālīm*, 88-89.

⁸⁹ Ibn Hawqal, *al-Masālik wa al-Mamālik*, 303.

⁹⁰ Ubayd Allāh ibn Ahmad ibn Khurdādhbih /ibn Khurdādhbih, *al-Masālik wa al-Mamālik*, 125.

⁹¹ George Zaydan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islāmi*, vol. 2, 89.

⁹² Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 48.

⁹³ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 41-42.

rezeki yang halal adalah kewajiban sebagaimana menuntut ilmu/spesialisasi). Pengertian mengenai “spesialisasi” yang dapat disampaikan adalah terkait dengan kewajiban menuntut ilmu yang sesuai dengan kondisi orang per orang. Misalnya, ketika menjadi seorang pedagang, maka seseorang diwajibkan menuntut ilmu perdagangan untuk menghindari ribā dan kontrak-kontrak yang rusak (*al-‘uqūd al-fasīdah*).⁹⁴

Tentang pelatihan, dapat diambil dari diktum al-Shaybānī selanjutnya: “*wa kamā anna talaba al-‘ilmi faridah fa adāu al-‘ilmi ilā al-nās faridah*”⁹⁵ (sebagaimana menuntut ilmu itu kewajiban maka menyampaikan ilmu kepada masyarakat juga merupakan kewajiban).

Yang cukup menarik adalah ide al-Shaybānī terkait tema ini dengan membatasi spesifikasi ‘trainer’ kepada orang-orang yang terkenal mumpuni atau kompeten dalam bidangnya (*ushtubirū bi al-‘ilm kbāssab*).⁹⁶ Kepada orang-orang inilah, kewajiban transfer keilmuan sejatinya berproses. Nampaknya item “terkenal” juga diintroduksi agar mereka yang mendapat pelatihan dapat percaya dengan kompetensi dan otoritas keilmuan sang pelatih. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa al-Shaybānī memasukkan salah satu elemen akuntabilitas yaitu integritas.

Dalam sejarahnya, pemerintahan al-Ma’mūn juga tercatat melakukan prinsip keahlian. Nampaknya ukuran keahlian ini adalah kepatuhan pegawai kekhalifahan kepada instruksi dan arah pemerintahan pusat. Hal ini misalnya dapat dilihat dari dua kejadian: yang pertama, al-Ma’mūn pernah melakukan eksekusi mati kepada pejabat negara yang bernama ‘Ali ibn Hishām (w. 217 H.) karena manajemen yang buruk dan tindakan semena-mena kepada masyarakat Azerbaijan dan beberapa daerah lain.⁹⁷ Yang kedua, al-Ma’mūn memberhentikan pejabat bernama Bisr ibn Da’wūd yang tidak mengirim hasil pajaknya kepada pemerintah pusat.⁹⁸ Pada berbagai kesempatan, al-

Ma’mūn juga mengirim instruksi terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan. Di antaranya adalah instuksinya kepada gubernur Khurasān, ‘Abd Allāh ibn Tāhir untuk mengurus dengan baik reformasi pemerintah dan rakyat, memelihara stabilitas, menaati pemerintah pusat, dan menyokong kemajuan negara. Bahkan oleh beberapa sejarawan, di antaranya al-Tabarī, instruksi ini dikirimkan kepada pejabat dan pegawai daerah yang lain. ‘Abd Allāh ibn Tahir sendiri dinilai berhasil melaksanakan instruksi tersebut.⁹⁹

d. Kebijakan Income

Sementara kebijakan income, yang dapat dilihat sebagai kebijakan moneter, dilihat dari inisiasi al-Shaybānī terkait pentingnya aktivitas derma yang ia dedahkan pada hampir satu per delapan isi buku *al-Iktisāb*.¹⁰⁰ Kebijakan moneter ini sendiri terfokus pada titik memperlancar fluktuasi nominal income atau nominal output. Pada level yang paling mendasar, targetnya adalah dua fitur yang dijadikan dua strategi moneter penting. Dua hal ini adalah (1) penentuan pergerakan harga dan output riil. (2) bertindak sebagai jangkar kebijakan moneter terhadap nominal dalam jangka yang panjang.¹⁰¹

Dalam konteks pasca krisis ekonomi fase al-Amīn, kebijakan income dapat dilihat sebagai sistem asistensi pemasukan yang diperuntukkan untuk populasi usia pekerja yang bertujuan mendorong para penganggur melampaui masa transisi (untuk mendapatkan) pekerjaan. Tren kebijakan sosial

⁹⁹ Instruksi lengkap pada lampiran II. Instruksi ini awalnya adalah tulisan Tāhir ibn al-Husayn, ayahanda dari ‘Abd Allāh. Menanggapi gonjang-ganjing seputar tulisan ini, al-Ma’mūn menanggapi dengan positif bahkan memerintahkan untuk memperbanyak tulisan dan mengirimnya kepada para pejabat. Ia memuji Abū al-Tayyib atau Tāhir ibn al-Husayn, sang penulis dengan perkataan berikut:

ما بقى أبو الطيب شيئا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به وتقدم

(Lihat: Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 161; Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fi al-Tārikh*, vol.3, 162-166; Ibn Khaldūn, *Tārikh ibn Khaldūn*, vol. 1,166).

¹⁰⁰ Al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, 59-67.

¹⁰¹ Gleen D. Rudebusch, “Assesing Nominal Income Rules for Monetary Policy with Model and Data Uncertainty,” *The Economic Journal*, vol. 112, no. 479 (2002): 402.

⁹⁴ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, 42. Bandingkan misalnya dengan keterangan Franz Rosenthal dalam *Knowledge Triumphant: the Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden: Brill, 2007).

⁹⁵ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, 43.

⁹⁶ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, 43.

⁹⁷ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 184; al-Sifdī, *al-Wāfi bi al-Wafayāt*, vol. 7, 89; Ibn ‘Asākir, *Tārikh Dimashq*, vol.43, 266.

⁹⁸ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 179.

yang berdimensi pekerjaan-sentris ini dilaksanakan melalui multi kombinasi: asistensi bertarget, reformasi pajak keuntungan, dan pengaktifan kebijakan-kebijakan lainnya.

Namun bila melihat seluruh gagasan terkait derma yang disampaikan oleh al-Shaybāni, maka poin yang nampaknya paling menarik adalah program income tidak diperbolehkan diperuntukkan kepada orang yang kaya.¹⁰² Maka wajarlah bila dalam konteks kebijakan pemerintahan al-Ma'mūn ini dapat dilihat sebagai kebijakan kesejahteraan (*welfare*) yang pada prinsipnya melengkapi income orang-orang yang memerlukan¹⁰³ dan tidak dapat berusaha.¹⁰⁴ Ide terkait kebijakan income ini dapat direfleksikan dari beberapa kebijakan pemerintahan al-Ma'mūn. Pada masa pemerintahannya, al-Ma'mūn dikenal sebagai orang yang memiliki berbagai kelebihan.¹⁰⁵ Beberapa narator seperti al-Tabarī dan al-Suyūṭī menggambarkan bahwa al-Ma'mūn terkenal dengan kebijakan yang baik dan mendukung kesejahteraan rakyat.¹⁰⁶ Dalam wasiat terakhirnya, al-Ma'mūn sangat menekankan pentingnya memperhatikan dan mensejahterakan masyarakat umum. Hal ini misalnya dapat terlihat dari pengulangan (*takrīr*) yang ia ucapkan saat memberi arahan terkait kewajiban atau tugas pemerintah: ”*al-ra'yyah-al-ra'yyah, al-'anwām-al-'anwām*” ([utamakan] rakyat, rakyat!, masyarakat luas, [sekali lagi] masyarakat luas!).¹⁰⁷

Suatu ketika saat berkunjung ke Damaskus, ia merasa kekurangan uang. Hal itu dia sampaikan

¹⁰² Al-Shaybānī, *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, 59.

¹⁰³ Bandingkan: Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, (New York: Prentice-Hall, Inc., 2001), 452.

¹⁰⁴ OECD, *OECD Employment Outlook* (Paris: OECD Publishing, 2006).

¹⁰⁵ Al-Ma'mūn dikenal memiliki kontribusi dalam beberapa kajian keilmuan. Di antara kata mutiara yang ia buat terkait ilmu pemerintahan:

يبقى الثناء وتنقد الاموال ... ولكل وقت دولة ورجال ...
من كبرت همته كثرت قيمته

لا تتق الدولة فانها ظل زائل ولا تعتمد على النعمة فانها ضيف راحل
فان الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب

(Al-Jibrītī, *'Ajā'ib al-Athār fi al-Tarājim wa al-Athār*, vol. 1 [Beirut: Dār al-Jayl, t.t.], 22).

¹⁰⁶ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 184, 198.

¹⁰⁷ Wasiat lengkap al-Ma'mūn yang disaksikan oleh pejabat sekitar istana sebagaimana didokumentasikan oleh al-Tabarī berisikan instruksi pengurusan jenazahnya dan arahan kebijakan khalifah setelahnya (Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 195).

kepada putera mahkota al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim pun berjanji untuk menyediakan uang setelah salat Jumat. Uang yang dijanjikan pun tiba dan berjumlah sekitar 30 juta dirham atau mencapai 1.920.000.000.000 Rupiah yang berasal dari pajak daerah kekuasaannya. Bukannya mengambil semua uang itu, al-Ma'mūn justru memerintahkan kepada Muhammad ibn Raddād/Yazdād untuk membaginya kepada para penduduk yang memerlukan hingga jumlah seluruh pendistribusian mencapai 24 juta dirham¹⁰⁸ atau sekitar 1.536.000.000.000 Rupiah. Al-Tabarī bahkan menceritakan kisah terkait penerus kekhalfahan setelah al-Ma'mūn yaitu al-Mu'tasim yang seakan iri karena tidak berhasil meneladani keberhasilan al-Ma'mūn dalam melahirkan kader-kader terbaik pemerintahan.¹⁰⁹

Kebijakan income pada masa al-Ma'mūn juga dapat tergambar dari nominal gaji yang dia berikan kepada para “pegawai” negara. Untuk para prajurit, hal ini dapat dilihat dari surat instruksi yang dikeluarkan oleh al-Ma'mūn. Di situ ia memerintahkan untuk membayar masing-masing prajurit kavaleri gaji sebesar 100 dirham atau setara dengan 6.400.000 Rupiah, dan kepada prajurit infantri sebesar 40 dirham atau sekitar 2.560.000 Rupiah.¹¹⁰ Gaji ini kadang, masih ditambah insentif-insentif tertentu yang sulit diketahui barometernya. Pada suatu kesempatan, ia memberi insentif yang cukup besar—dalam narasi al-Tabarī, dikatakan “tidak pernah sebesar itu”—yang diberikan masing-masing kepada gubernur Syiria dan Mesir dan Gubernur al-Jazīrah, al-Thugūr dan al-'Awāsīm. Jumlah masing-masingnya disebut mencapai 500 ribu Dinar.¹¹¹ Namun bila melihat secara keseluruhan narasi sejarahnya, nampaknya duit sebesar ini merupakan biaya untuk pemerintahan baru, meski pada kenyataannya dapat saja Gubernur memakainya untuk keperluan pribadi.

¹⁰⁸ (Abd al-Rahmān ibn al-Hasan al-Jibrītī, *Tārīkh 'Ajā'ib al-Athār fi al-Tarājim wa al-Akhbār*, vol. 1, 22).

Bandinkan: Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 198; Ismā'īl ibn Abī al-Fidā', *Tārīkh Abī al-Fidā'*, vol.1, 384.

¹⁰⁹ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407 H.), 272.

¹¹⁰ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 186.

¹¹¹ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 179; Muhammad ibn Ahmad ibn Uthmān al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām*, ed. 'Umar 'Abd al-Salām Tadmūrī, vol. 1, 1594.

Kebijakan seperti ini tidak hanya disokong oleh besarnya pemasukan negara, namun juga disertai kebijakan untuk merasionalisasi pajak yang diambil dari masing-masing daerah. Inilah yang nampaknya, salah satu faktor mengapa kemudian besaran pajak daerah Rhages berbeda dengan Khurasān. Al-Ma'mūn juga menerapkan politik ekonomi melalui jenis pajak penghasilan (*kebarāj muqāsamah* atau semacam *income tax*)¹¹² kepada petani di daerah al-Sawād, Irak. Dengan nisbah bagi hasil, petani agaknya lebih menerima kebijakan pajak ini karena dianggap lebih berkeadilan.

Sebaliknya, al-Amīn dikenal cukup pelit mengeluarkan uang untuk kepentingan umum, terutama terkait hal pangan (*al-ta'ām*), namun demikian demi kepentingan tertentu yang beraroma pribadi justru ia sangat royal. Ini misalnya terlihat dari beberapa narasi seperti narasi Ibn Kathīr yang mencatat uang yang dihamburkan oleh al-Amīn untuk memanjakan para pembantu dan orang dekatnya. Ia juga memerintahkan untuk dibuatkan lima kapal besar dengan berbagai bentuk hewan seperti singa, gajah, kalajengking, ular, dan kuda. Pembuatan kapal-kapal ini—meski tidak menyebut nominal secara gamblang—memakan biaya yang sangat besar (*malan azīman*).¹¹³ Dalam catatan yang lain, ia rela merogoh sekitar tiga juta Dirham hanya untuk dibagikan kepada penduduk ibukota Baghdad.¹¹⁴ Selama pemerintahan al-Amīn terdapat indikasi yang kuat bahwa banyak dari pekerja yang tidak mendapatkan gajinya. Oleh karena itu kita akan menemukan adanya narasi setelah al-Amīn dibunuh dan kepalanya diarak kepada al-Ma'mūn terkait “cacian” para pekerja di hadapan penggalan kepala al-Amīn karena rezeki mereka yang tidak dibayar.¹¹⁵

Taruhlah kita asumsikan bahwa kebijakan *income* yang tidak berbiaya tersedia. Lalu akan banyak orang yang setuju dengan ini, karena alasan ekonomi tertentu, seperti tingkat inflasi yang tinggi, sehingga kebijakan *income* untuk sementara waktu menjadi ide yang cukup bagus—dengan tujuan agar inflasi turun. Namun, masalahnya, ketika tingkat

inflasi telah turun, maka masyarakat akan dibiarkan terlalu jauh ke arah tingkat pengangguran. Hanya *income* yang permanen yang nampaknya secara mendasar dapat menekan tingkat pengangguran yang tidak beresiko pada inflasi (*non-inflationary level of unemployment*).¹¹⁶

Bagaimanapun, ongkos sebuah kebijakan *income* tentu saja harus diatur sedemikian rupa terhadap keuntungan-keuntungan yang diakibatkan. Kebijakan *income* yang konvensional yang bergantung pada adanya tawar-menawar kolektif tidak akan relevan dalam konteks masyarakat yang bebas. Namun beberapa fakta justru menunjukkan bahwa tawar-menawar itu justru terjadi yang menandai bahwa masyarakat Abbasiyah tidak sepenuhnya bebas. Oleh karena itu, bila tawar-menawar ini ada, maka kebijakan *income* yang dilakukan oleh khalifah dapat dilihat sebagai regulasi, bukan murni insentif.

Maka masyarakat Abbasiyah memiliki struktur yang cukup jelas. Menurut Allan McDonald, salah satu ciri masyarakat berstruktur jelas adalah adanya kesiapan anggota masyarakat itu untuk membantu mereka yang tidak mampu agar dapat membantu diri mereka untuk mandiri. Dalam masyarakat kapitalis, kesigapan untuk membantu orang lain ini direfleksikan dalam konsep “*welfare state*” atau negara kesejahteraan.¹¹⁷

e. Jaminan Sosial

Dalam tradisi ekonomi modern, konsepsi jaminan sosial sendiri dianggap tidak begitu jelas. Begitu banyak defenisi yang ditawarkan, seperti yang belakangan dikembangkan oleh Amartya Sen, hingga *social security* atau *social protection* dapat diekuivalensikan dengan semua kebijakan yang mendorong dan melindungi standar hidup.¹¹⁸ Namun demikian, yang jelas setidaknya terdapat tiga komponen utama jaminan sosial (*social protection*), yaitu (1) kompensasi terhadap penganggur, (2) transfer uang tunai, dan (3) dana perawatan kesehatan.¹¹⁹

¹¹⁶ Richard Layard, “Is Income Policy the Answer to Unemployment?,” *Economica*, vol. 49 (1982): 219-239.

¹¹⁷ Allan McDonald, *Unemployment Forever or a Support Income System and Work for All* (Urangan: A & D McDonald, 1995), 3.

¹¹⁸ Wouter van Ginneken, “Extending Social Security: Policies for Developing Countries,” *Extension of Social Security Paper*, no.13 (2003): 10.

¹¹⁹ OECD, *OECD Employment Outlook 2011* (Paris, OECD Publishing, 2011), 85-141.

¹¹² Muhammad Qal'ajī dan Hāmid Sādiq Qunaybī, *Mu'jam Luḡhat al-Fuqahā'*, vol. 1, 194; Bandingkan dengan keterangan Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 174.

¹¹³ Ismā'īl ibn Abū al-Fidā', *Tārikh Abi al-Fidā'*, vol. 1, 366.

¹¹⁴ Muhammad ibn Shākir al-Kutbī, *Fawāt al-Wafayāt*, vol. 4 (Beirut: Dār Sādir, 1974), 46.

¹¹⁵ Al-Mas'ūdī, *Murūj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jawbar*, vol. 2, 35.

Dalam konteks sejarah ekonomi, jaminan sosial dapat dilihat secara berbeda dan khas. Sejarahwan al-Ya'qūbī, misalnya, mendedahkan bahwa pada masa dinasti Cina telah memiliki semacam jaminan sosial untuk para penganggur terpaksa yang berhenti bekerja karena penyakit atau faktor usia. Namun demikian, kekaisaran China saat itu juga menerapkan kewajiban bekerja untuk laki-laki.¹²⁰ Dalam tradisi sejarah pemerintahan Islam abad pertengahan, tentu saja belum ada istilah khusus yang menyebut jaminan sosial (*al-damān al-ijtimā'ī*), namun ditemukan terma-terma yang sangat berkaitan erat dengan fungsi jaminan kesejahteraan masyarakat luas.

Terkait fungsi jaminan kesejahteraan sosial tersebut, maka ini dapat diambil dari diktum al-Shaybānī berikutnya yang berbunyi: "*qāla: wa yuḥḥadū 'alā al-nās it'amu al-muḥtāj fī al-waqt al-ladhī ya'jazu 'an al-khurūj wa al-talab*"¹²¹ (menurut al-Shaybānī: masyarakat berkewajiban untuk memberi "insentif" kepada orang yang memerlukan, ketika orang tersebut tidak kuasa untuk menemui masyarakat dan mencari rezeki). Nampaknya spirit diktum ini berasal dari hadis Nabi terkait struktur masyarakat muslim yang sejatinya eka dan padu.¹²²

Dalam hal ini, inisiasi al-Shaybānī ini cukup relevan bila dihubungkan dengan diskursus modern terkait *social security*. Namun, dalam batas tertentu, kewajiban seperti ini (*haqq al-māl*) adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang kaya dan didistribusikan kepada orang-orang fakir. Sungguhpun demikian, justru orang-orang fakir dianjurkan untuk tidak mengambil kewajiban ini demi menjaga harga diri.¹²³ Terkait hal ini, ada sebuah fragmen di mana seseorang yang bernama al-'Atābī menghadap kepada al-Ma'mūn. Sang khalifah berniat untuk mengujinya dengan menawarkan 1000 dinar, namun orang itu selalu menolak pemberian itu. Al-Ma'mūn dan kaki tangannya, Ishāq ibn Ibrāhīm al-Mūsili kembali menawarkan pemberian dengan nominal yang lebih besar, namun orang itu tidak menggubrisnya. Justru akhirnya orang yang bernama al-'Atābī ini menjadi akrab dengan al-Mūsili dan menginap di tempat

¹²⁰ Ahmad ibn Ishāq ibn Ja'far ibn Wahab al-Ya'qūbī, *Tārikh al-Ya'qūbī*, vol. 1, 158.

¹²¹ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 58.

¹²² Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 41.

¹²³ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 64-66.

tinggalnya.¹²⁴

Kisah ini—meski tidak menyebut apakah pada akhirnya al-'Attābī mengambil pemberian itu—menunjukkan bahwa aktivitas derma yang dapat dilihat sebagai penjaminan sosial dari pemerintah sejatinya juga didasari oleh mekanisme pengujian dan kelayakan. Karakter al-'Attābī mewakili orang-orang yang masih memiliki harga diri (*'iffah*).

Sebetulnya, perhatian yang cukup besar dari al-Shaybānī terhadap mereka yang kurang berlimpah materi ini juga terlihat dari "dukungannya" kepada pola hidup fakir.¹²⁵ Dukungan ini berada pada konteks terbatas yaitu diskursus terkait dua pilihan pola hidup: fakir dan kaya. Tumpuan utama dukungan al-Shaybānī sangat terkait dengan diktum: "*kefakiran itu lebih aman dari kontaminasi-kontaminasi yang dapat merusak "status kehambaan" kepada Tuhan*". Sekali lagi, pengaruh ideologi dan analisis komparatif al-Shaybānī sangat terlihat pada uraian-uraianya. Analisis komparatif ini dapat dibaca pada analogi dan contoh-contoh realitas yang berbeda dan implikasi dari masing-masingnya.

Di sisi lain, al-Shaybānī sangat menekankan adanya "kesadaran komunal lintas status" baik status ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, al-Shaybānī menyebut: *anna al-faqīr yaḥtāj ilā māl al-ghaniyy wa al-ghaniyy yaḥtāj ilā 'amal al-faqīr* (orang fakir sesungguhnya memerlukan harta orang kaya, sebagaimana orang kaya itu juga memerlukan kinerja orang fakir). Al-Shaybānī juga menyadari adanya interdependensi (saling ketergantungan) dalam lintas status itu, satu sama lain.¹²⁶

Namun demikian, al-Shaybānī tidak secara gamblang menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang fakir tersebut. Pola hidup fakir ini, nampaknya tidak identik pola hidup kifāyah, yang sekadar untuk menutupi kebutuhan mendasar (keperluan sandang pokok dan keperluan lain yang menunjang pelaksanaan kewajiban).

Nampaknya gagasan al-Shaybānī ini menemukan refleksi salah satunya pada kebijakan

¹²⁴ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 204; al-Mas'ūdī, *Murij al-Dhabab wa Ma'adin al-Jawhar*, vol. 2, 41.

¹²⁵ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 32.

¹²⁶ Al-Shaybānī menyebut contoh di antaranya ketergantungan antara dua profesi, penjahit dan petani. Penjahit memerlukan makanan untuk bekerja, seperti petani juga memerlukan penjahit untuk berpakaian (Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 47-48).

al-Ma'mūn saat menyelesaikan kesusahan dan utang seseorang yang bernama al-Yazīdī. Awalnya al-Ma'mūn mengaku bahwa ia tidak memiliki uang untuk membantu orang tersebut. Namun ia menjanjikan dapat memberinya salah seorang pejabat istana. Dengan kecerdikannya, al-Ma'mūn bersiasat memberi al-Yazīdī kesempatan memilih salah seorang pejabat agar dapat dijadikan asistennya. Tentu saja sang pejabat istana lebih memilih tetap sebagai pegawai al-Ma'mūn ketimbang “terbuang” menjadi hadiah bagi al-Yazīdī. Sejarawan al-Tabarī menulis bahwa orang ini akhirnya menerima uang sejumlah 100 ribu Dirham dari si pejabat. Ia berdusta bahwa uang itu adalah jumlah hutangnya kepada al-Yazīdī. Berkat “kecerdikannya”, al-Ma'mūn dapat “mengerjai” pejabat kaya di istana dan membantu orang yang kesusahan tersebut.¹²⁷ Juga terdapat plot terkait pelunasan pemerintah al-Ma'mūn atas hutang seseorang bernama Muhammad ibn 'Abbad. Hutang itu mencapai angka 60 ribu Dinar. Oleh pemerintah, ibn 'Abbad menerima bantuan pelunasan hutang itu sebesar 100 ribu Dinar.¹²⁸ Di lain kesempatan, al-Ma'mūn juga pernah memerintahkan untuk mencukupi keperluan keluarga tertentu yang berada di Suriah.¹²⁹

Sejarawan al-Mas'ūdī juga melansir kejadian terkait seorang orang tua yang tidak dapat lagi bekerja, mendapat musibah alam sehingga kekayaannya habis dan memiliki hutang dan tanggungan anggota keluarganya. Orang ini kemudian diberi dana sebesar 50 ribu Dirham.¹³⁰ Juga disampaikan plot terkait pemberian “insentif” oleh pemerintah kepada para sufi yang menilai baik pemerintahan al-Ma'mūn. Sebelumnya utusan mereka datang kepada al-Ma'mūn dan berdialog dengannya. Al-Ma'mūn kemudian memerintah agar menginspeksi kemana dan bagaimana orang itu kembali. Ternyata orang itu kembali ke komunitas sufi dan menilai baik pemerintahan al-Ma'mūn. Al-Ma'mūn pun memerintahkan agar keperluan komunitas itu dicukupi (*kafaynā mu'natā hāulā' bi aysar al-khatb*).¹³¹

¹²⁷ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 203.

¹²⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Uthmān al-Dhahabī, *Tārikh al-Islām*, 'Umar 'Abd al-Salām Tadmūrī, ed., vol. 1, 1658.

¹²⁹ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 200.

¹³⁰ Al-Mas'ūdī, *Murij al-Dhabab wa Ma'adin al-Jawbar*, vol. 2, 42.

¹³¹ Al-Mas'ūdī, *Murij al-Dhabab wa Ma'adin al-Jawbar*, vol.

Namun yang agak menarik adalah adanya semacam penjaminan kebutuhan hidup bagi keluarga kerajaan yang terdiri dari keturunan al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib paman Nabi Muhammad yang pada pemerintahan al-Ma'mūn berhasil disensus. Jumlah keturunan ini baik laki-laki ataupun perempuan mencapai 30 ribu orang.¹³² Tidak diketahui secara pasti alasan khusus pemerintah al-Ma'mūn dari penjaminan ini kecuali bahwa memang terdapat perintah sang Nabi agar keluarganya dijamin oleh *Bayt al-Māl*.

Dari beberapa narasi sejarah yang berhasil penulis telusuri, dapat dikatakan bahwa penjaminan sosial dalam konteks pemerintahan al-Ma'mūn berkolerasi dengan kriteria utama berupa: (1) keperluan hidup yang tercermin baik dari “ketidakmampuan” seseorang secara ekonomi atau sosial, dan (2) menjadi warga yang baik dengan tiga pra syarat: 1. loyalitas yang baik 2. tidak menyebarkan rahasia negara, dan 3. menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹³³ (3) kriteria khusus berupa “keturunan darah biru”. Kriteria-kriteria ini terutama yang kedua, memiliki potensi tendensi subyektifitas akan sangat besar sehingga menghajatkan pada sistem informasi terkait obyek warga negara tersebut. Oleh karena inilah, pada umumnya para khalifah memiliki banyak informan dan orang-orang kepercayaan.

Penjaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintahan al-Ma'mūn ini pada dasarnya bersumber dari dana pajak yang mencapai angka 200 dirham/tahun yang mayoritasnya disumbang oleh sektor pertanian yang mencapai sepertiga total pemasukan negara. Namun nominal pajak juga amat ditentukan oleh kondisi pembayar pajak. Sebagai ilustrasi, penduduk Khurasān yang sangat produktif secara ekonomi dan geografis menyumbang pajak yang sangat besar. Data yang disampaikan oleh al-Tabarī menyebut kisaran 2 juta dirham. Namun untuk penduduk daerah Rhages, jumlah total pajak tidak sebesar itu, bahkan belakangan dikurangi oleh al-Ma'mūn.¹³⁴ Namun, tercatat juga tercatat penjaminan masyarakat yang berasal dari bahwa suatu ketika al-Ma'mūn mengeluarkan gajinya

2, 44; al-Dhahabī, *Sīyar A'alām al-Nubalā'*, vol. 10, 278; al-Suyūṭī, *Tārikh al-Khulafā'*, 327.

¹³² Ibn Khaldūn, *Tārikh ibn Khaldūn*, vol. 1, 88.

¹³³ Al-Mas'ūdī, *Murij al-Dhabab wa MA'adin al-Jawbar*, vol. 2, 37.

¹³⁴ Bandingkan dengan keterangan Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 174.

sebanyak 2 juta dirham ketika sampai di daerah Rhages atau al-Rayy.¹³⁵

Jizyah dan zakat juga diyakini menempati pos ekonomi yang strategis. Hal ini terutama pada masa abad pertama Hijrah hingga akhirnya kurang dilirik sebagai instrumen fundamental ekonomi berefek panjang-luas. Padahal dalam perspektif beberapa ahli “keuangan publik” khilāfah, seperti al-Māwardī, sejatinya zakat menjadi instrumen utama dalam pemasukan negara. Disusul oleh pos-pos pemasukan lain seperti al-Kharāj, al-Jizyah, dan lain-lain.

f. Hirarki al-Ma‘rūf

Inisiasi terkait pola hidup sederhana dapat diambil dari gagasan berikutnya. Al-Shaybānī dalam hal ini, inisiasi terhadap adanya empat keperluan sangat mendasar: (1) pangan [*al-ta‘ām*]; (2) air [*al-sharāb*]; (3) sandang; [*al-libās*] dan (4) tempat tinggal [*al-kinn*].¹³⁶ Setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa pola hidup kifayah yang dimaksud oleh al-Shaybānī dalam karya-nya adalah pola hidup yang mencukupi empat keperluan mendasar ini. Namun pola hidup untuk melengkapi empat kebutuhan di atas juga harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Empat hal di atas ditekankan oleh al-Shaybānī sebagai “batas bertahan” / *al-baqā’*.¹³⁷ Artinya ini adalah batas minimal yang sejatinya didapatkan oleh setiap warga negara, khususnya pekerja.

Keperluan lainnya adalah *al-tawassut*/ keperluan yang secukupnya/ sedang-sedang saja.¹³⁸ Menurut al-Shaybānī, ukuran *tawassut* ini adalah di antara *israf* (berlebih-lebihan) dan *taqtir*

(di luar ambang batas dapat bertahan/*survival needs*).¹³⁹ Dalam kesempatan yang lain, al-Shaybānī menggunakan terma Qurani “*al-ma‘rūf*” sebagai kata sepadan dengan “*tawassut*.”¹⁴⁰

Sayangnya al-Shaybānī tidak secara gamblang menyebutkan ukuran jelas dalam konsepsi-konsepsinya itu, terutama terkait dengan konsepsi *al-israf*. Justru ia hanya menunjukkan secara acak dan dalam lingkup yang sangat terbatas—aktivitas makan dan keperluan sandang—yang menurut pemahamannya termasuk dalam kategori *al-israf*. Sebagai contoh, memakan bagian tengah roti karena lebih lezat dan membiarkan bagian pinggir sisanya tidak termakan dianggap sebagai salah satu tindakan *israf*.¹⁴¹

Dalam sejarah elit negara Abbasiyah sendiri, gaya hidup “*al-badhkh*” atau “mewah” dipelopori oleh khalifah al-Mahdī.¹⁴² Gaya hidup ini pada awalnya dapat dilihat secara mencolok pada kebijakan khalifah untuk memperbanyak “pembantu” kerajaan yang berasal dari beberapa ras bangsa. Kebijakan yang awalnya ditelurkan oleh khalifah al-Amīn ini mengakibatkan membludaknya jumlah pembantu hingga mencapai angka 11 ribu orang pada saat pemerintahan al-Muqtadir bi Allāh.¹⁴³

Namun demikian, al-Ma‘mūn dikenal cukup mendukung pola hidup secukupnya. Dalam suatu informasi sejarah, al-Ma‘mūn pernah melarang fasilitas lilin yang berbahan dari *ambergris* harum yang diletakkan di mangkuk emas. Padahal fasilitas itu pada dasarnya disediakan sebagai penerang ruangan al-Ma‘mūn sendiri.¹⁴⁴ Namun demikian, ditemukan setidaknya satu plot narasi sejarah yang justru tidak mengkonfirmasi pola hidup secukupnya ini. Pada saat resepsi perkawinannya, al-Ma‘mūn malah mempertontonkan “gaya hidup mewah”. Ini terlihat dari mahar yang diberikannya kepada mempelai perempuan yang bernama Būrān binti al-Hasan ibn Sahl berupa 1000 yaqut,

¹³⁵ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 146.

¹³⁶ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 47. Argumentasi Qur’ani yang digunakan oleh al-Shaybānī untuk keperluan pangan adalah Q.S. al-Anbiyā: 8 dan Q.S. Tahā: 81. Untuk keperluan air yaitu Q.S. al-Anbiyā: 30 dan Q.S. al-Baqarah: 60. Adapun keperluan sandang yaitu Q.S. al-A‘arāf: 26, 31. Sementara keperluan tempat tinggal yaitu dari Q.S. al-Nisā: 28. Al-Shaybānī juga menyitir hadis bahwa seorang mukmin tidak akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat terkait tiga hal: (1) pakaian yang menutupi aurat; (2) makanan sekadar keperluan aktivitas; (3) tempat tinggal yang layak. Artinya dapat melindungi dari panas dan dingin (Lihat: Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 67)

¹³⁷ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 47.

¹³⁸ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 50.

¹³⁹ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 50.

¹⁴⁰ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 55.

¹⁴¹ Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī, *al-Iktisāb fī al-Riḥq al-Mustatāb*, 52-53.

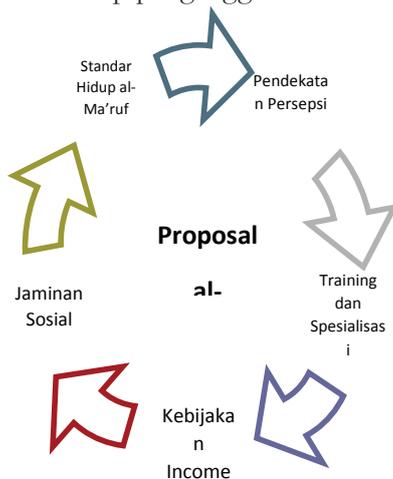
¹⁴² Al-Tabarī, *Tārīkh al-Tabarī*, vol. 8, 156-172.

¹⁴³ Muhammad ibn Alī ibn Muhammad ibn Tabātabā ibn al-Taḥṭāqī, *al-Fakhrī fī al-Adāb al-Sultāniyyah*, 234; George Zaydān, *Tārīkh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 4, 182-184.

¹⁴⁴ Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. 5, 171.

beberapa lilin *ambergris* yang masing-masing berisi 100 hadiah, dan permadani bertenun emas berhiaskan permata dan yaqut. Ini belum termasuk fasilitas kapal penumpang sebanyak 30 ribu buah bagi para undangan resepsi dan hidangan yang menghabiskan kayu yang biasanya cukup untuk tiga tahun hidangan.¹⁴⁵Namun demikian, “informasi tunggal” ini tidak kemudian dapat menjadi suatu konfirmasi bahwa memang begitulah gaya hidup al-Ma’mūn secara keseluruhan. Karena sifatnya yang terbatas pada konteks resepsi negara, maka klaim bahwa al-Ma’mūn adalah seorang “borjuis nan berlebih-lebihan” tidak dapat disematkan begitu saja kepadanya.

Dengan demikian, gagasan al-Shaybānī dalam ranah teori kebijakan terhadap pengangguran, dapat dilihat sebagai kebijakan yang menggabungkan (konvergentif) beberapa instrumen dari tipologi-tipologi kebijakan modern terhadap pengangguran. Dalam tataran, fase pasca krisis perekonomian, inisiasi tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan stabilisasi terhadap pengangguran.



Gambar 3. Ilustrasi Proposal Kebijakan al-Shaybānī

Secara lebih gamblang, kebijakan pertama dan kedua al-Shaybānī, yaitu pendekatan persepsi, training, dan spesialisasi dapat dikategorikan dalam kebijakan “sisi supply” yang fokus terhadap pembentukan modal manusia (*human capital*).¹⁴⁶Sementara kebijakan *income* (pendapatan) dan jaminan sosial juga dapat dikategorikan pada kebijakan sisi supply karena berfungsi sebagai stimulator terhadap mobilitas pekerja. Sedangkan inisiasi terkait standar hidup “*al-ma’rūf*” dapat dibaca sebagai ukuran untuk melakukan bargaining

¹⁴⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Tarikh ibn Khaldūn*, vol. 1, 87.

¹⁴⁶Lihat halaman 39

upah dalam tipologi kebijakan institusional. Di sisi lain, standar hidup al-ma’rūf juga dapat dikaitkan dengan kebijakan manajemen demand, terutama terkait dengan teori kejutan harga dan upah.

Anggaphlah bahwa ketika tidak ada intervensi pemerintah, perekonomian akan mencapai equilibrium pada titik E, sementara kurva agregat *demand* D_0D_0 melewati kurva agregat *supply* SS. Jika output yang berkorespondensi dengan titik E terlalu rendah, yang berarti membiarkan banyak pekerja menganggur, maka pemerintah dapat menekan tingkat pengangguran itu dengan meningkatkan agregat *demand*.¹⁴⁷Maka secara umum, resesi dan pengangguran itu lebih disebabkan oleh agregat *demand* yang tidak cukup (*insufficient aggregate demand*). Bila itu terjadi, kebijakan fiskal dan moneter yang sukses menambah *demand* menjadi jalan efektif untuk meningkatkan *output* dan mengurangi pengangguran. Secara normal, ini juga meningkatkan tingkat harga.

Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa setiap bagian masuk akal dari kebijakan ekonomi bertumpu pada analisis rasional-empiris. Analisis ini berdasar pada masalah tertentu; dibenamkan atas suatu landasan fungsional ekonomi. Para politisi mungkin percaya bahwa proposal kebijakan mereka bertumpu pada akal sehat (*common sense*) yang cenderung terbatas pada masalah tertentu. Tapi pikiran yang mendasari *common sense* itu sendiri membentuk sebuah koherensi: *self-contained theory* (teori kandungan diri/ teori mandiri). Seperti yang pernah J. M. Keynes tulis dalam masterpiecnya.¹⁴⁸

Maka ada dua hal yang melandasi kebijakan al-Ma’mūn, yang pertama landasan masalah tertentu yang bersifat empiris. Yang kedua adalah, landasan fungsi ekonomi yang bersifat rasional. Bila yang pertama lebih membutuhkan kejelian dan kepemimpinan al-Ma’mūn, yang kedua lebih didominasi oleh inisiasi al-Shaybānī dalam karyanya al-Iktisāb.

Tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat konvergentif terhadap pengangguran akan berhasil menstabilkan tingkat pengangguran.

¹⁴⁷William J. Baumol & Alan S. Blinder, *Economics: Principles and Policy*, 12th Edition, 482.

¹⁴⁸J. M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (New York: Harcourt Brace & World, 1936), 383; *A ‘Second Edition’ of the General Theory*, ed. G. C. Harcourt dan P. A. Riach, vol. 2 (London: Routledge, 1997), 127.

Dengan kata lain, pembatasan intervensi pemerintah terhadap tingkat pengangguran—secara umum—menjadi pandangan yang ahistoris bahkan irasional. Postulatnya adalah data sejarah yang terjadi pada masa al-Amīn dan al-Ma'mūn dan “inisiasi al-Shaybānī”—kalau belum dapat disebut “teori al-Shaybānī”. Dengan konteks krisis ekonomi pada masa al-Amīn, inisiasi al-Shaybānī yang diimplementasikan al-Ma'mūn itu boleh disebut sebagai “kebijakan stabilisasi” pengangguran.

Secara diskursif, tulisan ini berposisi terhadap kebijakan yang membenamkan dirinya pada teori *laissez-faire* yang diikuti pendiri dan pengikut mazhab ekonomi klasik dan neo-klasik seperti Adam Smith, W. Barnett, Walter Block (2011), G. Haberier (1958); M. Friedman (1968). Pandangan *laissez-faire* ini, secara substantif, menandakan intervensi pemerintah terhadap tingkat pengangguran harus sedikit atau jangan ada intervensi sama sekali.

Mungkin saja pembatasan pemerintah memberi dampak positif terhadap tingkat pengangguran. Namun tidak lucu, bila saat tingkat pengangguran melonjak akibat gejala ekonomi-sosial, campur tangan pemerintah dibatasi. Apalagi, pembatasan itu dengan dalih adanya mekanisme internal berupa “*invisible hand*”. Sebab seringkali, mekanisme pasar yang seakan tanpa batas itu sendiri yang akhirnya menciptakan krisis dan resesi ekonomi.

Di sisi yang lain, posisi tulisan ini mendukung—pada batas tertentu—kalangan yang menyarankan adanya kebijakan manajemen permintaan (*demand management*) yang secara substantif menyarankan adanya kebijakan rekrutmen pekerja di sektor publik dan upaya meningkatkan permintaan produk demi meningkatnya permintaan pekerja. Pandangan ini secara *mainstream* dianut oleh aliran Keynesian dan Neo-Keynesian seperti Michael Woodford (2003), G. A. Akerlof dan J. L. Yellen (1985). Titik pertemuan antara kebijakan manajemen permintaan dan inisiasi al-Shaybānī ialah pada ide terkait “kebijakan income”.

Kebijakan income ini sendiri tercermin dari beberapa langkah al-Ma'mūn yang melakukan perbaikan pada (a) kebijakan fiskal, upah, dan moneter; (b) kebijakan korporasi terkait pengaturan upah yang melibatkan mitra sosial dan pemerintah; (c) adanya tunjangan cuma-cuma untuk pengangguran yang dikombinasikan dengan fleksibilitas tinggi pada pasar pekerja.

Namun, al-Ma'mūn belum melakukan semacam *work-sharing* yang dikombinasikan dengan

efisiensi dalam kapasitas produksi; pengurangan waktu seminggu kerja; cuti pendidikan dan fleksibilitas yang lebih luas pada jam kerja serta skema pensiun dini.

Di lain titik, posisi tulisan ini mendukung kebijakan sisi supply yang secara substantif memiliki empat ciri: (1) fokus pada pembentukan modal fisik; (2) fokus pada pembentukan modal manusia; (3) dukungan pencarian kerja dan penyebaran informasi kerja; (4) kebijakan menjadi stimulator pada meningkatnya mobilitas kerja. Kebijakan sisi supply ini misalnya getol disuarakan oleh Garry Burtless (2001), Scarperta (1996), Nickell (1998). Titik pertemuan kebijakan supply dan gagasan al-Shaybānī adalah terletak pada kerangka idenya tentang pendekatan persepsi dan training/spesialisasi.

Pendekatan persepsi dan inisiasi tentang spesialisasi terlihat pada (a) komitmen politik al-Ma'mūn terhadap kebijakan “ketenagakerjaan penuh” (*full employment*) dan adanya konsensus dengan mitra sosial pemerintah untuk memprioritaskan pertumbuhan lapangan kerja; (2) adanya dorongan (melalui pelatihan dan pendidikan) agar terjadi perubahan struktural (inovasi).

Terhadap perspektif kebijakan institusional, tulisan ini—melalui gagasan hirarki al-ma'rūf—juga dinilai berada pada posisi yang mendukung dalam batasan tertentu. Kebijakan institusional secara substantif terkait dengan implikasi dari tiga hal (1) “*labor union*”, (2) tawar menawar upah, dan (3) teori *insider-outsider* terhadap tingkat pengangguran. Kebijakan institusional sendiri misalnya didukung oleh Richard Layard dan S. J. Nickell (2009).

Sayangnya, pemerintah al-Ma'mūn cukup giat melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pada kondisi produksi (iklim, SDA), alat produksi (alat, mesin), namun agak ceroboh terhadap perbaikan relasi produksi (upah, kelas sosial, keterasingan).

Selanjutnya, gagasan al-Shaybānī tentang jaminan sosial membentuk koherensi dengan kebijakan kontraktual yang secara substantif memiliki enam fitur: (1) berbagi kerja dan pensiun dini. (2) kebijakan berpihak pada biaya perputaran tenaga kerja. (3) profit sharing atau bagi keuntungan. (4) subsidi upah rendah dan pengurangan pajak penggajian. (5) Subsidi rekrutmen pekerja baru. (6) transfer keuntungan. Kebijakan kontraktual ini di antaranya disuarakan oleh Lindbeck & Snower (1988), M. Weitzman (1984).

Fakta terkait implementasi jaminan sosial dapat dilihat dari (a) adanya subsidi upah (*arṣāq*) dan semacam rekomodifikasi. Namun demikian, data terkait tanggung jawab sosial pengusaha swasta yang diiringi dengan usaha membentuk lapangan kerja baru dan mengurangi diskriminasi, masih relatif sulit ditemukan; (b) membentuk kegiatan yang bermanfaat secara sosial dan individual di luar pekerjaan formal. Kegiatan ini berdampak terhadap munculnya tingkat moderat penawaran tenaga kerja.

Maka kasus Abbasiyah di atas, setidaknya juga merefleksikan konstruk ekonomi al-Shaybānī yang cenderung berbasis pada norma profetik, kerjasama, dan harmoni sosial. Proses analisis yang dihasilkan terhadap perjalanan sejarah sosio-ekonomi itu sendiri mengindikasikan empat hal: (1) distingsi struktur ekonomi dan pemerintahan tidak kemudian menyebabkan terbatasnya solusi kebijakan hanya pada konteks negara Abbasiyah itu saja. Ringkasnya, ada solusi-solusi yang menjadi semacam obat bersama (*cureall*) untuk problem pengangguran; (2) tipe kebijakan terhadap problem ekonomi sejatinya bukan yang membenamkan landasan teoritisnya pada asumsi mekanisme pasar yang murni steril dari intervensi pemerintah; (3) tingkat kesempatan kerja penuh sejatinya dapat ditekan hingga mendekati 0 persen; (4) sistem ekonomi sederhana cenderung tidak mengkonfirmasi adanya *trade-off* antara inflasi dan tingkat pengangguran.

Nampaknya, semua poin di atas patut dijadikan cermin oleh perekonomian Indonesia khususnya, dan perekonomian dunia pada umumnya. Solusi bersama terkait pengangguran nampaknya juga tetap diakomodasi oleh berbagai pemerintahan. Namun biasanya, tapal batas antara keberhasilan dan kegagalan adalah justru pada ketekunan, kejujuran, dan komitmen dalam mengeksekusi skema kebijakan. *Wallahu wa Rasuluhu Alam.*

Daftar Pustaka

Abraham, K. & L. F. Katz. "Cyclical Unemployment: Sectoral Shifts or Aggregate Disturbances?" *Journal of Political Economy*, vol. 94, no. 3 (1986) : 507-522.

Abū al-Fidā, *al-Mukhtasar fī Akbār al-Bashar*, vol. 1. t.t.p.

Abū Zahra', Muhammad. *Abū Hanīfah: Hayātuhū wa 'Asrūhū, Ārā'uhū wa Fiqhuhū*, vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1947.

Al-Afghānī, Sa'īd. *Aswāq al-'Arab fī al-Jābiliyyah wa al-Islām*, Edisi ke-2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1960.

Agénor, Pierre-Richard, Alejandro Izquierdo, & Henning Tarp Jensen. *Adjustment Policies, Poverty, and Unemployment: the IMMPA Framework*. Malden: Blackwell Publishing, 2007.

Ashtor, Eliyahu. *Histoire des Prix et des Salaires Dans l'Orient Médiéval*. Paris: S.E.V.P.E.N., 1969.

Al-'Asqalānī, Ibn al-Hajar. *Lisān al-Mizān*, vol. 1. t.t.p.

Al-Astrābādhī, Rādy al-Dīn. *Sharh Shāfiyat Ibn al-Hājib*, ed. Muhammad Nūr al-Hasan, dkk., vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1975.

Audretsch, D. B., A. R. Thurik, I. Verheul. dan A. R. M. Wennekers, ed. *Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European-US Comparison*. Boston/Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.

Al-'Aynī, Badr al-Dīn. *'Aqd al-Jumān fī Tarīkh Abl al-Zamān*, vol. 1, ed. M. M. Amīn. Cairo: Dār al-Kutub, 1987.

Al-Ba'alī, Muhammad ibn Abī al-Fath. *al-Matla' 'alā Abwāb al-Fiqh*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1981.

Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2011.." *Berita Resmi Statistik*, no. 33/05/Th. XIV (5 Mei 2011): 1-5.

Badan Pusat Statistik, "Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi." *Berita Resmi Statistik*, no. 55/09/Th. XIV (5 September 2011): 1-11.

Baeck, Louis. *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*. New York: Routledge, 1994.

Al-Baghawī, Abū Muhammad al-Husayn ibn Mahmūd. *Ma'alim al-Tanzīl*, vol. 1, ed. Muhammad 'Abd Allāh al-Namir, dkk. Madinah: Dār Taybah li al-Nashr wa al-'Tawzī'i, 1997.

Al-Baghdādī, Ahmad ibn 'Alyy ibn Thābit. *Tārīkh Baghdād*, vol. 1, 6. Cairo: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2001.

Al-Bakrī, Abū 'Ubayd. *Simt al-La'ālī fī Sharh Amālī al-Qālī*, ed. Abd al-'Azīz al-Maymanī, vol. 1. Cairo: Matba'at Lajnat al-Ta'līf, 1936.

- Al-Balādhurī. *Futūḥ al-Buldān*. Leiden: t.p. 1866.
- Ball, L. & S. G. Cecchetti. "Imperfect Information and Staggered Price Setting." *American Economics Review*, vol. 78 (1988): 999-1018.
- Ball, L. & D. Rommer, "The Equilibrium and Optional Timing of Price Changes." *Review of Economic Studies*, vol. 56 (1989) : 179-198.
- Bappenas. "Lampiran Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014." *Buku I Prioritas Nasional*. Jakarta: Bappenas, 2010.
- Barro, R. J. & H. Grossman. *Money, Employment and Inflation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Baumol, William J. & Alan S. Blinder. *Economics: Principles and Policy*, 12th Edition. Mason, OH: South-Eastern, 2011.
- Bean, Charles R. "The Role in Demand Management Policies in Reducing Unemployment." *Centre of Economics and Performance LSE Discussion Paper*, 222 (1994).
- Becker, G., K. M. Murphy, dan R. Tamura. "Human Capital, Fertility, and Economic Growth." Dalam *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, 323-350. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
- Becker, G. Becker dan K. M. Murphy. "A Theory of Rational Addiction." *Journal of Political Economy*, vol. 96 (1988) : 675-700.
- Bek, Amīn Wāshif. *Mu'jam al-Kharīṭah al-Tārīkhīyyah li al-Mamālik al-Islāmiyyah*, ed. Ahmad Dhakī Bashā. Cairo: Maktabat al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1998.
- Bell, David N. F. & David G. Glanchflower. *What Should be Done about Rising Unemployment in the UK?* Stirling: University of Stirling, 2009.
- Berman, Eli, John Bound & Zvi Griliches. "Changes in the Demand for Skilled Labor within U.S. Manufacturing: Evidence from the Annual Survey of Manufactures." *Quarterly Journal of Economics* 109, no. 2 (1994) : 367-397.
- Bosker, Martin, Eltjo Buring dan J. L. van Zanden, "From Baghdad to London: the Dynamics of Urban Growth in Europe and the Arab World, 800-1800." *CEPR Discussion Paper*, no. DP6833 (2008) : 40-41.
- Bowitz dan Å. Cappelen. "Velferdsstatens økonomiske grunnlag." Dalam *Den norske velferdsstaten*, ed. A. Hatland, S. Kuhnle and T.I. Romøren. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001.
- Brown, Alessio J. G., dkk. "Comparing the Effectiveness of Employment Subsidies." *IZA Discussion Paper*, no. 2835 (2007) : 1-34.
- Burtless, Gary. "Can Supply-Side Policies Reduce Unemployment?: Lesson from North America." *Center for Economic Policy Research Discussion Paper*, ANU. No. 440 (2001).
- Calmfors, Lars & John Driffill. "Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance." *Economic Policy*, vol. 3, no. 6 (1988) : 13-61.
- Calvo, G. A. "Staggered Prices in A Utility-Maximizing Framework." *Journal of Monetary Economics*, vol. 12 (1983) : 83-98.
- Campbell R. McConnell, dkk. *Contemporary Labor Economics*, 7th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006.
- Caplin, A. & D. Spulber. "Menu Costs and the Neutrality of Money." *Quarterly Journal of Economics*, no. 102 (1986) : 703-725.
- Card, David dan Alan Krueger. *Myth and Measurement: the New Economics of the Minimum Wage*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1995.
- Carlton, D. "The Rigidity of Prices." *American Economics Review*, vol. 76, no. 4 (1986) : 637-658.
- Chatterij, S. & R. Cooper. "Multiplicity of Equilibria and Fluctuations in Dynamic Imperfectly Competitive Economies." *American Economic Review*, vol. 79 (1989): 353-357.
- Collin, P. H. *Dictionary of Economics*. London: A & C Black, 2006.
- Cot, Annie L dan Jérôme Lallement. "The Historiography of Economics, a Methodological Approach." *Joseph A. Schumpeter, Historian of Economics Perspectives on the History of Economic Thought*. London: Routledge, 1996.
- Cooper, R. & A. John. "Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models." *Quarterly Journal of Economics*, vol. 103 (1988): 441-463.

- Davis, Gerald F., Marina v. N. Whitman, dan Mayer N. Zald. "The Responsibility Paradox: Multinational Firms and Global Corporate Social Responsibility." *Ross School of Business Working Paper Series*, no. 1031, (2006).
- Al-Dhahabī, *Tārikh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhīr wa al-ʿĀlām*, ed. Bashhār ʿAwwād, vol. 4. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2001.
- Al-Dhahabī, Muhammad ibn Ahmad. *Sīyar AʿĀlām al-Nubalāʾ*. Cairo: Maktabat al-Risālah, 1985.
- Diamond, Peter A. "Aggregate Demand Management in Search Equilibrium." *The Journal of Political Economy*, vol. 90 (1982) : 881.
- Diamond, Peter. "Unemployment, Vacancies, Wages," *Nobel Lecture* (8 Desember 2010) : 1-10.
- Dixon, Huw. "A Simple Model of Imperfect Competition with Walrasian Features." *Oxford Economic Papers*, vol. 39 (1987) : 134-160.
- Dixon, H. & N. Rankin. "Imperfect Competition and Macroeconomics: A Survey," *Oxford Economic Papers*, vol. 46 (1994): 171-199.
- Doak, Robin S. *Great Empires of the Past: Empire of the Islamic World*. New York: Chelsea House, 2010.
- Al-Ghazālī, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. *Ihyāʾ ʿUlūm al-Dīn*, vol. 1, ed. Muhammad al-Minshāwī. Cairo: Maktabat al-Īmān, 1996.
- Ginneken, Wouter van. "Extending Social Security: Policies for Developing Countries." *Extension of Social Security Paper*, no.13 (2003): 10.
- Goitein, S. D. "the Rise of the Middle-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times." *Cahiers d'histoire mondiale*, III (1957) Edisi Revisi dalam *Studies in Islam and Islamic Institutions* (1966) : 217.
- Maddison, Angus. *Countours of World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Mahyudi, Akhmad. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Malinvaud, E. *The Theory of Unemployed Reconsidered*. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Al-Mirsafī, Sayyid ibn ʿAlī. *Kitāb Ragbbat al-ʿĀmal*, vol. 6. Cairo: al-Fārūq al-Hadīthah, 1998.
- Al-Mirzabānī, Muhammad ibn ʿImrān. *Muʿjam al-Shuʿarāʾ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1982.
- Mishra, Ramesh. *Globalization and Welfare State*. Cheltenham: Edward Elgar, 1999.
- Mitchell, William dan Joan Muysken. *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*. Cheltenham: Edward Elgar, 2008.
- Moen, Espen & Asa Rosen. "Does Poaching Distort Training?" *Discussion Paper CEPR*, no. 3468 (2002) : 1-38.
- Morris, Lydia. *Dangerous Classes: the Underclass and Social Citizenship*. London: Routledge, 1994.
- Mortensen, D. T. "Job Search and Labor Market Analysis." Dalam *Handbook of Labor Economics*, ed. O. C. Ashenfalter & R. Layard, vol. 2., 849-919. Amsterdam: North-Holland, 1986.
- Mortensen, D. T. & C. A. Pissarides. "Job Reallocation, Employment Fluctuations, and Unemployment Differences." Dalam *Handbook of Macroeconomics*, ed. J. Taylor & M. Woodford, vol. 3. Amsterdam: NorthHolland, 1997.
- Mortensen, Dale T., Christopher A. Pissarides. "Unemployment Responses to 'Skill-biased' Technology Shocks: the Role of Labour Market Policy." *The Economic Journal*, vol. 109, no. 455 (1999) : 245-265.
- Moses, J. W. "Floating Fortunes: Scandinavian Full Employment in the Tumultuous 1970s-1980s." Dalam *Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social Democracy*. ed, R.Geyer, C. Ingebritsen & J.W. Moses. London: Macmillan Pub. Co., 2000.
- Moudud, Jamee K. "State Policies and the Warranted Growth Rate." *Levy Economics Institute Working Paper*, no. 349 (2002): 1-11.
- Mountjoy, Alan B. *Industrialization and Developing Countries*. London: Hutchinson, 1975.
- Al-Mubarrad, Muhammad ibn Yazīd ibn ʿAbd al-Akbar. *al-Kāmil fī al-Lughab*. Cairo: t.t.p.
- Muellbauer, J. & R. Portes. "Macroeconomic Models with Quantity Rationing." *Economic Journal*, vol. 88 (1978): 788-821.

- Muhammad, 'Ali Jum'ah. *Al-Makāyil wa al-Mawāzīn al-Shar'īyah*. Cairo: al-Quds, 2001.
- Schumpeter, Joseph A. *History of Economic Analysis*, ed. Elizabeth B. Schumpeter. London: Routledge, 2006.
- Al-Shāfi'ī, Muhammad ibn Idrīs, *al-Umm*, vol. 4. t.t.p.
- Shaikh, Anwar M. "Economic Policy in A Growth Context: A Classical Synthesis of Keynes and Harrod." *Metroeconomica*, vol. 60 (2009) : 445-494.
- Shapiro, C. dan J. E. Stiglitz. "Equilibrium Unemployment as a Discipline Device." *American Economic Review*, vol.74 (1984) : 433-444.
- Shahhātah, Husayn. "al-Manhaj al-Islāmī li 'Ilāj Mushkilat al-Batālah." *al-'Alamiyyah*, vol. 18 (2006).
- Shatzmiller, Maya. *Labour in the Medieval Islamic World*. Leiden: Brill, 1994.
- Sha'ūt, Ibrāhīm 'Alī. *Ab'atīl Yajib An TumHā min al-Tārikh*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988.
- Al-Shaybānī, Muhammad ibn al-Hasan. *al-Iktisāb fi al-Riḥq al-Mustatāb*, ed. Mahmūd 'Arnūs. Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.
- Al-Shaybānī, Muhammad ibn al-Hasan. "Al-Kasb." *Manuskriif Koleksi Mūsā Kāzīm*, no. 1152 dan no. 1153 Jami'at Umm al-Qurā, Maktabat al-Malik 'Abd Allāh bin 'Abd al-'Azīz (1348 H.).
- Sheldon, G. "The Impact of Foreign Labor on Relative Wages and Growth in Switzerland." *Labor market and Industrial Organization Research Unit (FAI)*, Program 39 (2000) : 1-23.
- Al-Shīrāzī, Ayat Allāh al-Sayyid Muhammad al-Husaynī. *Min al-Tamaddun al-Islāmī*. Karbala: t.p., 1977.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. "Obstacles of Research in Islamic Economics." *Islamic Economics Journal*, no. 2, vol. 21, (2008) : 83-85.
- Siddiqi, Shamim Ahmad. "a Suggested Methodology for the Political Economy of Islam." *King Abdul Azīz University Journal: Islamic Economics*, no. 22 (2009) : 101-142.
- Al-Sifdī, Salāh al-Dīn al-Khalīl. *al-Wafī bi al-Wafayāt*, vol. 7. Beirut: Dār Ihyā' al-'Turāth al-'Arabī, 2000.
- Simpfendorfer, Ben. *The New Silk Road, How a Rising Arab World is Turning Away from the West and Discovering China*. London: Palgrave Macmillan, 2009.
- Smith, Stephen W. *Labour Market*, 2th Edition. London: Routledge, 2003.
- UNDP. "Sustainability and Equity: A Better Future for All." *Human Development Report 2011* (2011): 178.
- Pagano, Marco. "Imperfect Competition, Underemployment Equilibria and Fiscal Policy." *The Economic Journal*, vol. 100, (1990): 440-463.
- Page, Arnot, R. *A Marx House Syllabus, An Introduction to Political Economy*. London: Lawrence & Wishart, t.t.
- Pamuk, Şevket dan Maya Shatzmiller. "Real Wages and GDP per Capita in Medieval Islamic Middle East in Comparative Perspective, 700-1500." *Paper presented at the 9th Conference of the European Historical Economics Society* (September 2011) : 5.
- Paulré, Bernard. "Is the New Economy a Useful Concept?" *Working Paper from Laboratoire MATISSE- I.S.Y.S. [Innovation - Systèmes – Stratégies]*, (2000).
- Pellat, C. *Ibn al-Muqaffa': "Conseiller" du calife*. Paris: Maisonneuve, 1976.
- Phelps, E. S. "Wage Subsidy Programs: Alternative Design." Dalam *Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market*, ed. Dennis J. Snower & Guillermo de la Daheza, 206-229. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Phelps, E. S. "Money-Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium." *Journal of Political Economy*, vol. 76 (1968) : 678-711.
- Philpott, John, ed. *Working for Full Employment*. London: Routledge, 1997.
- Pissarides, C. "Short Run Equilibrium Dynamics of Unemployment, Vacancies, and Real Wages." *American Economic Review*, vol. 75 (1985): 676-690.

- Pissarides, C. A. Unemployment and Vacancies in Britain.” *Economic Policy*, vol. 3 (1986) : 499-559.
- Pissarides, Christopher A. “Equilibrium in the Labour Market with Search Frictions.” *Nobel Lecture* (8 Desember 2010) : 1-13.
- Pissarides, Christopher A. *Equilibrium Unemployment Theory*, 2th Edition. Cambridge: MIT Press, 2000.
- Polachek, S. W. dan W. S. Siebert. *The Economics of Earnings*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Pranab Chatterjee, dkk. “Adolescence and Old Age in Twelve Communities.” *Journal of Sociology and Social Welfare*, vol. 28 (2001).
- Wang, George C., ed. *Fundamentals of Political Economy*, terj. Cheng-Chih ching Chi Hsüeh chi Ch’u chih-shih. New York: M.E. Sharpe Inc. Publisher, 1977.
- Wangen, Knut R. “Some Fundamental Problems in Becker, Grossman and Murphy’s Implementation of Rational Addiction Theory.” *Statistics Norway’s Discussion Paper*, no. 375 (2004) : 1-13.
- Worldlgo. “Abbasid.” <http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Abbasid> (diakses pada 13 April 2011).
- Al-Washā, Muhammad ibn Ishāq. *Kitab al-Muwashshā*. Cairo: Maktabat al-Khanjī, 1953.
- Weeramantry, Judge Christopher G. *Justice Without Frontiers: Furthering Human Rights*. Leiden: Brill Publishers, 1997.
- Weinkopf, C. “Labour Pools – Innovative Approach on the Labour Market.” Dalam *Working Europe. Reshaping European employment systems*, ed. J. Christiansen, P Koistinen and A. Kovalainen. Aldershot: Ashgate, 1999.
- Weiss, A. “Job Queues and Layoff in Labor Markets with Flexible Wage.” *Journal of Political Economy*, vol. 88 (1980) : 526-538.
- Weitzman, M. *The Share Economy: Conquering Stagflation*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- Wetherbe, James C., dkk. *Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy*, 6th Edition. New York: Wiley, 2007.
- Wardhana, Dharendra & Dhanie Nugroho, “Pengangguran Struktural di Indonesia: Keterangan dari Analisis SVAR dalam Kerangka Hysteresis.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, vol. 21, no. 4 (2006): 361-375.
- Whelan, Christopher T. *Social Class, Unemployment, and Psychological Distress*. ESRI, 1991.
- Wichard, J. C. *Zwischen. Markt und Moschee: Wirtschaftliche Bedürfnisse und Religiöse Anforderungen im Frühen Islamischen Vertragsrecht*. Paderborn: 1995.
- Wilson, Rodney dan Ahmed A. F. Al-Ashker. *Islamic Economics a Short History*. Leiden: Brill, 2006.
- Al-Ya’qūbī, Ahmad ibn Ishāq ibn Ja’far ibn Wahab. *Tārikh al-Ya’qūbī*, vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Zamakhsharī, Rabi’ al-Abrār wa Nusūs al-Akbbār, vol. 1. Beirut: Muassasat al-A’alā li al-Matbū’āt, 1992.
- Al-Zamakhsharī, Mahmūd ibn ‘Umar ibn Ahmad. *Asās al-Balāghah*, vol. 2. Beirut: Dār al-Sādir, 1979.
- Zaydan, George. *Tārikh al-Tamaddun al-Islāmī*, vol. 1, 2. Cairo: Matba’at al-Hilāl, 1921.
- Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn ibn Mahmūd. *al-A’alām*, 15th Edition, vol. 1, 4. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 2002.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol.7, cet. 2. Damaskus, Dār al-Fikr, 1985.